

LAPORAN PENELITIAN

PPKD

MENAKAR REALITAS POLITIK PENCITRAAN PADA PILGUB NTB 2018 (Perspektif Etika Politik Islam)

Ahmad Nurjihadi
NIP.197907262011011006
ID Peneliti: 202607790207139



**PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH (P3I)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M)
UIN MATARAM
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan penelitian yang berjudul “Menakar Realitas Politik Pencitraan Pada Pilgub NTB 2018 (Perspektif Etika Politik Islam)” No. Register 17101000000284 dengan klasifikasi kluster Penelitian Pembinaan Kapasitas Dasar yang disusun oleh:

1. Nama : Ahmad Nurjihadi, M.Ag
2. NIP : 197907262011011006
3. No. ID Peneliti : 202607790207139
4. Bidang Keilmuan : Fiqh Siyasah

Yang pembiayaannya bersumber dari dana BOPTN DIPA UIN Mataram Tahun 2018, sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), telah memenuhi ketentuan teknis dan akademis sebagai laporan hasil penelitian, sesuai petunjuk teknis penelitian dosen UIN Mataram.

Mataram, 03 November 2018

Mengetahui,
Ketua LPPM



Dr. H. Nazar Naamy, M.Si
NIP. 197202012000031001

Kepala P3I

Dr. Winengan, M.Si
NIP. 197612312005011007

KATA PENGANTAR

Assallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan serta kesempatan, sehingga peneliti bisa menyelesaikan laporan akhir penelitian dengan tema “*Menakar Politik Pencitraan Menjelang PILGUB NTB 2018; Perspektif Etika Politik Islam*”. Dalam kesempatan ini pula peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Mutawali, M.Ag, selaku Rektor UIN Mataram
2. Dr. Nazar Na'amy, M.Si, selaku Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian pada Masyarakat UIN Mataram.
3. Dr. Winengan, MAP, selaku Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah UIN Mataram.
4. Seluruh pihak yang peneliti wawancari dan teman berdiskusi, atas kerja sama yang baik dalam proses penelitian ini.

Kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, peneliti ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Peneliti

Ahmad Nurjihadi

RINGKASAN HASIL PENELITIAN

Penelitian ini mengambil tema “Menakar Realitas Politik Pencitraan Pada PILGUB NTB 2018”. Fokus penelitian berusaha menjawab bagaimana politik pencitraan yang dimainkan oleh kontestan calon gubernur dan wakil gubernur yang mengikuti kontestasi PILGUB NTB 2018 dan bagaimana Analisis Etika Politik Islam terhadap fakta politik pencitraan. Karakter penelitian ini adalah penelitian fenomenologis yang akan membongkar paradigma, etika dan moralitas politik yang melatari adanya politik pencitraan baik positif maupun negatif dan terproduksi menjadi laku tindakan politik para kandidat. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis fenomena sistemik yang berusaha mengurai fakta politik pencitraan dan menakarnya dengan analisis etika politik Islam.

Paradigma besar besar penelitian ini adalah bahwa etika etika politik memiliki tiga dimensi yaitu tujuan, sarana dan aksi politik itu sendiri. Pada dimensi tujuan bila diurai dan dikontekstualisasi dengan fenomena pilkada, maka tujuan suksesi adalah upaya sadar laku politik dalam upaya peremajaan dan pergantian kepemimpinan yang tujuannya tidak lain adalah peningkatan akseleratif pada tujuan-tujuan politik pilkada dalam rangka memacu dengan lebih cepat upaya penyejahteraan masyarakat dengan monitoring kuat dari etika politik yang santun, beradab dan berkeadilan. Sedangkan pada dimensi sarana, opsi perhelatan pilkada langsung merupakan instrumen terbaik dalam rangka mendapatkan kualitas kontestasi politik yang terbuka dan memberi partisipasi penuh kepada warga masyarakat. Pada dimensi aksi politik berkaitan erat dengan prilaku politisi yang harus menjadikan etika politik yang santun, berkeadaban dan berkeadilan menjadi *guiding* di setiap prilaku politik yang selalu memenangkan hati konstituen dan rakyat sebagai wujud memberikan hak kedaulatan pada rakyat. Hasil penelitian menggambarkan bahwa politik pencitraan yang dimainkan oleh Politisi NTB menjelang Pilkada memiliki beberapa kecenderungan yaitu; *pertama*, A dan B mencalonkan diri menjadi Gubernur NTB 2018 padahal masa baktinya baru berjalan kurang dari 2 Tahun. *Kedua*, Fenomena perempuan dan kecenderungan politik dinasti. *Ketiga*, kecenderungan politisi nasional turun gunung. *Keempat*, Personafikasi Personal Kandidat seperti penonjolan citra yang berbasis dan berintegritas agamais (Muslim). *Kelima*, Psedo-Populis yaitu adanya fenomena mendadak populis yang ditampilkan oleh beberapa calon. *Keenam* adalah Penguatan Identitas Komunal dan Kewilayahan seperti afiliasi pada organisasi keagamaan, putra daerah yang berbasis kewilayahan dan asal suku.

Kata Kunci: *Politik Pencitraan, Komunikasi Politik, Etika Politik Islam*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan LP2M	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan Hasil Penelitian	iv
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Signifikansi dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN DAN PERSPEKTIF	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	10
BAB III METODE PENELITIAN	15
A. Desain Penelitian.....	15
B. Metode Pengumpulan Data	15
C. Analisis Data	16
D. Keabsahan Data	17
BAB IV MENAKAR REALITAS POLITIK PENCITRAAN PADA PILGUB NTB 2018	18
A. Realitas Politik NTB pada Pemilihan Gubernur 2018	21
B. Konfigurasi Politisi NTB pada Pemilihan Gubernur 2018	29
C. Fenomena Politik Pencitraan pada Kontestasi Pemilihan Gubernur NTB 2018	43
D. Analisis Etika Politik Islam terhadap Politik Pencitraan pada PILGUB NTB 2018	53
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Implikasi Teoritis	64
C. Rekomendasi	67
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Imagologi (imago berarti imaji atau citra dan logos berarti ilmu atau kebenaran) merupakan definisi sentral yang digunakan untuk menjelaskan ilmu tentang citra di dalam masyarakat dan signifikansi informasi serta peran sentral teknologi informasi dalam membentuk citra tersebut. Penggunaan citra-citra tertentu untuk mengkreasi imaji tentang realitas yang pada titik tertentu dianggap merupakan realitas itu sendiri merupakan sasaran dari imagologi.¹

Imagologi Politik atau politik pencitraan merupakan satu strategi politik yang kian populer di kalangan para politisi atau peminat politik untuk memperkuat citra diri mereka di mata publik. Pencitraan menjadi perspektif yang khas bagi seseorang untuk menilai individuasi dan kelompok dalam politik praktis. Ketika imaji yang dikonstruksi mempunyai nilai yang menggugah, maka biasanya ketertarikan menyertai karena merupakan fase tindak lanjut atas usah untuk memperkenalkan atau membangun pencitraan.

Politik secara definitif sekurang-kurangnya terbangun dalam lima pandangan. *Pertama*, politik merupakan ikhtiar atau usaha-usaha yang ditempuh warga Negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan

¹ Imagologi (imago berarti imaji atau citra dan logos berarti ilmu atau kebenaran) merupakan definisi sentral yang digunakan untuk menjelaskan ilmu tentang citra di dalam masyarakat dan signifikansi informasi serta peran sentral teknologi informasi dalam membentuk citra tersebut. Penggunaan citra-citra tertentu untuk mengkreasi imaji tentang realitas yang pada titik tertentu dianggap merupakan realitas itu sendiri merupakan sasaran dari imagologi. Lihat, Yasraf Amir Piliang, *Hantu-hantu Politik dan Matinya Sosial*, (Solo: Tiga Serangkai, 2003), hlm.150. Lihat juga, <https://dhutag.wordpress.com/2009/05/10/politik-imagologi/>, di akses tanggal 15 Januari 2018

penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, politik adalah kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Sedangkan *Siyasah* (Politik Islam) merupakan postulat hal-ihwal, seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Politik Islam (*Siyasah*) secara ontologis sangat mengedepankan etika, karena etika merupakan entitas utama dalam Islam politik yang secara logis seide dengan capaian filsafat moral manusia sebagai pengetahuan normatif yang membutuhkan medium pembedaan (*embodying*) dalam bentuk laku manusia dalam menjalani kehidupan sosial dan keagamaan secara komprehensif.²

Pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat (*Government and Society*) di antara lembaga-lembaga pemerintah dan antara kelompok dengan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik pada prinsipnya tidak terlepas dari etika dan ajaran agama. Di tengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi dalam membangun laku pribadi dan laku sosial. Sebagian dari laku individual dan sosial adalah laku politik yaitu perilaku yang bersangkutan jalin dengan proses politik di semua level pemerintahan.

Kekuasaan sebagai kajian politik dalam Islam bukanlah merupakan barang terlarang. Kekuasaan dalam politik dianjurkan selama tujuannya adalah untuk menjalankan amanat dan visi-visi kemaslahatan umat. Tugas politik dalam pandangan Islam tersublimasi dengan baik, efektif dan konkret ketika

² Lihat, Muhammad Zakaria al-Naddaf, *Akhlaqus Siyasi Li al-Daulah al-Islamiyyah Fi al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Damaskus: Dar al-Qolam, 2006), Cet. Ke-1, Hlm.19.

disandingkan dengan kepemimpinan yang beretika dengan laku moral yang memadai dan islami. Karena politik dalam Islam dipandang sebagai bagian dari ibadah sehingga prinsip-prinsip keberlakuannya seyoginya bernafaskan prinsip-prinsip ibadah. Di lain sisi, politik berkenaan dengan prinsip Islam dalam mengorganisasi, mengelola dan memajemen masyarakat, karena itu prinsip-prinsip relasi intersubjektif (hubungan antarmanusia) seperti saling menghargai hak orang lain dan tidak memaksakan kehendak menjadi keharusan dalam dunia politik.

Etika politik dalam perspektif Islam dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis dengan bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi masyarakat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih logis dan benar serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika politik dalam pandangan Islam juga mengamanatkan agar penyelenggaraan Negara mampu memberikan kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kepentingan kelompok lainnya untuk mencapai kemajuan berbangsa dan bernegara.

Prinsip dasar politik Islam yang terurai dalam Al-Qur'an al-Sunnah yaitu; *Pertama*, prinsip menunaikan amanat dengan klasifikasi amanat (tanggung jawab) manusia kepada Allah SWT, tanggung jawab intersubyek dan tanggung manusia terhadap dirinya sendiri. *Kedua*, prinsip keadilan. *Ketiga*, prinsip ketaatan kepada Allah, rasul dan *Ulul Amri* dan *keempat*, prinsip merujuk kepada Allah dan rasulullah jika terjadi perselisihan. Idealitas prinsip kehidupan politik Islam menetapkan nilai-nilai dasar yaitu; *pertama*, prinsip musyawarah (*syura*) yang tidak hanya dimaknai sebagai prosedur pengambilan keputusan yang direkomendasi tetapi juga merupakan tugas

keagamaan.³ *Kedua*, prinsip persamaan (*musawah*).⁴ *Ketiga*, prinsip keadilan (*adalah*) merupakan penegasan karakter kepemimpinan yang lurus, bertanggung jawab dan bertindak sesuai dengan kontrol sosial yang mampu mewujudkan keharmonisan dan keadilan hidup.⁵ *Keempat*, prinsip kebebasan (*al-hurriyah*) yang merupakan tanggung jawab yang menjadi tahapan pertama tindakan kearah perilaku yang diatur secara rasional berdasarkan kebutuhan nyata manusia, baik secara material maupun secara spiritual. Kebebasan yang dipelihara oleh politik Islam adalah kebebasan yang berorientasi pada kebaikan.⁶

Selanjutnya etika politik memiliki tujuan mentransformasi yang mana tingkah laku atau laku politik yang baik dan buruk. Standar baik dalam konteks politik adalah bagaimana politik diarahkan untuk memajukan kepentingan umum (kemaslahatan umat) yang jelas-jelas jauh dari pretensi kepentingan individu dan golongan tertentu.

Dalam etika individual, bila orang mempunyai pandangan tertentu memungkinkan untuk langsung diartikulasi dalam tindakan. Sedangkan dalam etika politik yang merupakan etika sosial dalam mewujudkan pandangannya membutuhkan konsensus dari sebanyak mungkin warganegara karena menyangkut tindakan kolektif. Maka korelasi antara pandangan hidup seseorang dengan tindakan kolektif monokausal dan tidak langsung, akan tetapi membutuhkan jembatan atau perantara. Perantara ini secara fungsional sebagai jembatan penghubung antara pandangan individual dengan tindakan kolektif. Perantara itu bisa berupa nilai-nilai dan simbol-simbol baik kesadaran religius, simbol dan nilai demokrasi, dan nilai-nilai keadilan, persamaan, kesetaraan, kebebasan dan keadilan. Melalui simbol-simbol dan nilai-nilai itu, politisi berkeharusan untuk berusaha meyakinkan sebanyak mungkin warga Negara agar menerima pandangannya sehingga mendorong kepada tindakan bersama.

³ Q.S. Al Imran: 159, Q.S. As-Syura: 38.

⁴ Q.S. Al-hujurat: 13.

⁵ Q.S. Al-Maidah: 8

⁶ Q.S. Al-An'am: 164.

Asumsi ontologis di atas menggambarkan bahwa politik secara teoritis disebut seni karena membutuhkan kemampuan untuk meyakinkan melalui wicara dan persuasi bukan manipulasi, kebohongan, penghianatan dan kekerasan. Dalam bahasa Hannah Arendt, politik merupakan seni untuk mengabadikan diri manusia.⁷ Dengan makna bahwa mengabadikan diri merupakan seni untuk dikenang oleh sesama warga Negara dan di tinta emaskan sejarah karena jasa dan prestasi dalam membangun kehidupan bersama yang memberi bobot pada identitas politisi dengan menciptakan habitat hidup bersama dan menjadi momentum otentik dalam membuktikan diri sebagai negarawan.⁸ Sampai titik ini, etika politik dihajatkan sebagai media mengorientasi dan membentuk tata hidup, laku politis, dan juga etos kerja yang mengkonstruksi aktivitas politik yang bukan hanya karena kodrat sosial manusia melainkan sesuatu yang diikhtiarkan.

Politik dimengerti sebagai seni yang mengandung kesantunan (*fatsoen politik*) yang mengacu pada suatu proses dan aktifitas politik yang mengandung asas-asas etika keadaban, tatakrama, dan tanggung jawab dalam bingkai kesetaraan dan penghormatan kepada sesama pelaku politik dan konstituen. Dalam tataran praksis pola laku personal maupun institusional dari aktor-aktor politik seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai yang membasis pada konsistensi politik dan integritas moral. Kesantunan politik diukur dengan keutamaan moral. Kesantunan akan nampak nyata bila ada rekognisi (pengakuan) resiprokal dan relasi yang *fair* di antara para pelaku politik.

Pada konteks berpolitik di Indonesia dapat diperhatikan bahwa semenjak era reformasi yang membuka kran demokrasi dan kebebasan politik seluas-luasnya. Tampak jelas dan miris dimana para politisi Negara ini mempertontonkan kendornya (dekadensi?) etika politik dalam setiap jejak perjalanan suksesi demokrasi prosedural maupun demokrasi substantif. Sikap

⁷ Hannah Arendt, *The Human Condition*, (Chicago: The Chicago UP, 1958), hlm.5

⁸ Lihat, Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014), Hlm. 9.

pragmatisme dalam laku politik yang individuatif dan atau mementingkan kelompoknya saja tanpa menghiraukan kepentingan bangsa yang menjadi prioritas utama. Kondisi ini dalam praktik keseharian menggambarkan politik berwajah kuasa elitis daripada kekuasaan dengan wajah populis dan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat. Politik menjadi identik dengan strategi bagaimana kekuasaan diraih dan dengan cara apapun walaupun bertentangan dengan kesadaran dan pandangan umum.

Tanpa kita sadari, nilai etis politik cenderung mengarah pada kompetisi dan kontestasi yang mengabaikan moral. Ini terbukti dengan mengguritanya *political shopping* (pasar politik) karena semua harga jabatan politik setara dengan sejumlah uang dan semua jabatan politik memiliki banderol (daftar harga) yang harus dibayar. Bangga menjadi Negara demokrasi yang damai terbesar setelah Amerika Serikat dan India disamping Negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Akan tetapi fenomena politik yang menyeruak belakangan ini malah mengarah serta menohok pada arus balik yang condong mengotori demokrasi, nilai-nilai *psedu-democracy* (kepura-puraan demokrasi) yang dijadikan sebagai landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sedikit tidak ada beberapa contoh kasus yang mencederai etika politik dan etika politik Islam di Indonesia. Persoalan etika dan perilaku politik para politisi dan pemimpin baik dari tingkat pusat sampai daerah (provinsi, kabupaten dan kota) mempertontonkan imagologi politik dalam rangka mengejar nafsu kuasa. Karena pada kenyataannya, politik pencitraan atau imagologi politik selalu menghadirkan kontroversi di dalam masyarakat. Kontroversi muncul saat pencitraan dinilai tidak lagi diletakkan pada substansi pencitraan itu sendiri, namun lebih pada penampilan-penampilan yang kehilangan substansi. Lebih parah lagi, kontroversi semakin menjadi-jadi ketika pencitraan politik yang dilakukan dinilai hanya menjadi demagog politik belaka.⁹

⁹ Demagogi adalah istilah politik yang berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang bermakna rakyat dan “*agogos*” yang bermakna pimpinan dalam arti negatif yaitu

Fenomena dan asumsi di masyarakat tentang politik pencitraan yang lumayan menghadirkan kontroversi di atas menjadi kegelisahan akademik peneliti untuk menelisik lebih jauh dalam rangka menganalisis dan membongkar kesadaran etika politik para politisi Indonesia baik di tingkat nasional maupun lokal kedaerahan. Guna efektivitas penelitian, studi ini dipersempit objeknya dengan hanya mengungkap realitas politik pencitraan (imagologi politik) menjelang PILKADA Gubernur NTB 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, fokus penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena politik pencitraan yang dimainkan oleh Politisi NTB pada kontestasi pemilihan gubernur NTB 2018?
2. Bagaimanakah analisis *siyasah syar'iyah* terhadap politik pencitraan Politisi NTB pada PILGUB 2018?

C. Signifikansi dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini berorientasi pada semangat kuat menemukan jawaban atas kegelisahan akademik di atas dan bertujuan untuk mengelaborasi secara komprehensif realitas politik pada kontestasi menjelang dan pada PILGUB NTB 2018 dengan mengungkap fakta-fakta politik pencitraan politisi NTB. Signifikansi penelitian ini juga untuk mengetahui dan menemukan argumentasi akademis dan menganalisis politik pencitraan politisi NTB menjelang PILGUB 2018 perspektif Etika Politik Islam.

pemimpin yang menyesatkan demi kepentingan pribadinya. Padanan kata demagog biasanya provokator. Dalam KBBI dimaknai sebagai penghasutan terhadap orang banyak dengan kata-kata yang dusta untuk membangkitkan emosi rakyat. <https://kbbi.web.id/demagogi.html>. Akses tanggal 20 September 2017.

Manfaat dan kegunaan akademis, penelitian ini diharapkan akan membuka ruang diskusi tentang Etika Politik Islam dan berusaha menformulasi struktur fundamental dan praksis kesantunan politik guna mencapai cita kemaslahatan kolektif dalam berbangsa dan bernegara. Sedangkan manfaat praktis, penelitian ini dengan penuh harap menjadi pemicu konseptualisasi sains praktis dalam memposisikan etika kuasa dan berpolitik yang santun dan bermartabat serta merumuskan isu-isu strategis yang sesuai dengan kondisi kekinian di Indonesia dan NTB pada khususnya.

BAB II

LANDASAN DAN PERSPEKTIF

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Buku Etika Politik dan Kekuasaan karya Haryatmoko. Buku ini mengurai panjang lebar tentang filsafat politik, etika politik dan konstruksi budaya politik baik secara ontologis maupun epistemologi. Semangat buku ini berorientasi pada idealisasi relasi etika politik dengan kekuasaan yang terlihat ambigu karena di satu sisi etika politik membutuhkan tempat berpijak yaitu kekuasaan, tetapi sekaligus ia kritis terhadap praktik kekuasaan politik.

Perbedaan substantif dengan penelitian ini sebagai *prior research* penulis adalah bahwa buku ini sebenarnya sangat bernuansa filosofis karena mengurai etika politik dalam bingkai filsafat dan penulis sangat kompeten dalam menjelaskan secara filosofis hakekat etika politik dan filsafat politik dengan berusaha mengawinkannya bersama politik praksis. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada *prejudice* (persangkaan ilmiah) tentang mengendornya etika politik dan budaya politik yang santun dalam kehidupan demokrasi prosedural di Indonesia khususnya di level daerah NTB yang menjadi fokus obyek studi.

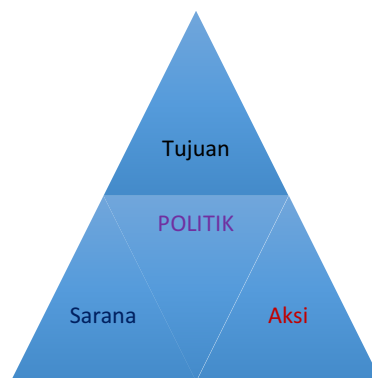
Buku kedua adalah Hantu-hantu Politik dan Matinya Sosial karya Yasraf Amir Piliang. Buku ini mengurai panjang lebar tentang bekerjanya politik yang mampu mengintervensi hukum, prinsip-prinsip keadilan dalam sosial-ekonomi, budaya bahkan seni dengan penghancuran batas-batas, dekonstruksi norma-norma yang dibingkai dalam hutan rimba citra yang penuh absurditas dan ironi. Perbedaan substantif dengan penelitian ini adalah peneliti menfokuskan studi pada realitas pencitraan politik para politisi NTB menjelang PILGUB 2018 dengan mengurai tema imagologi politik menggunakan pendekatan atau tinjauan Etika Politik Islam.

B. Kajian Teoritik

Untuk membedah studi ini, penulis menggunakan sejumlah teori yaitu etika politik dan konsepsi *Siyasah* (etika politik Islam) dan teori demokrasi elektoral dan prosedural.

1. Komunikasi Politik dalam Etika Politik

Paling minimal ada 3 bentuk pemiskinan yang akan didapatkan yaitu; *pertama*, peniadaan perdebatan ideologi, diskusi panjang tentang nilai-nilai dan perdebatan tentang prioritas. Dengan demikian, pendekatan pragmatisme politik condong anti pluralitas karena wacana, wicara dan persuasi merupakan media komunikasi dengan yang lain tentu tidak mendapat tempat. *Kedua*, pemiskinan politik tanpa etika politik merubah ruang publik menjadi tereduksi sebagai pasar (*political market*). *Ketiga*, pemiskinan politik yang terjadi dalam lingkup etika politik adalah penolakan terhadap pluralitas dan praktek diskriminasi yang tentunya bertentangan dengan arah yang dibidik termasuk melecehkan kebebasan atau *hurriyah* dalam terminologi etika politik Islam.



Gambar 1. Hubungan Relasional Etika Politik dan Praksis Politik

Etika politik mengandung aspek individual dan sosial. Di satu pihak etika politik sekaligus adalah etika individual karena mendiskusikan tentang kualitas moral pelaku dan etika sosial karena merefleksi masalah

hukum, tatanan sosial dan institusi yang adil. Di lain pihak, etika politik sekaligus etika institusional dan etika keutamaan. Institusi dan keutamaan merupakan dua dimensi etika yang saling mendukung. Keutamaan merupakan faktor stabilisasi tindakan yang berasal dari dalam diri pelaku..

Mainstream komunikasi politik adalah studi tentang strategi penggunaan komunikasi politik untuk memengaruhi pengetahuan publik, kepercayaan dan tindakan politik. Seiring dengan perkembangan studi komunikasi politik, lahir apa yang disebut dengan *political marketing* yang secara khusus mengelaborasi bagaimana "menjual" dan memasarkan produk politik baik yang berkaitan dengan kebijakan, partai atau kandidat agar "laku" atau berterima di masyarakat pemilih.

CPM (Comprehensive Political Marketing) sebagai satu kerangka teoritis memiliki prinsip-prinsip kunci diantaranya; *Pertama*, CPM memandang bahwa *marketing* politik lebih dari sekedar komunikasi politik. *Kedua*, CPM mengaplikasikan pendekatan marketing ke seluruh perilaku organisasi politik, partai atau kandidat yang tidak hanya pada konteks bagaimana berkampanye, bagaimana kampanye diorganisir namun juga pada bagaimana partai mendesain produk pasar dan dagangan politik. *Ketiga*, CPM menggunakan konsep marketing seperti orientasi produk, *sales* dan *market*, intelegensia pasar, desain produk dan promosinya. *Empat*, CPM mengintegrasikan ilmu politik dalam analisisnya beserta konsep marketing yang digunakan untuk menyesuaikan dengan pemahaman yang ada dari pembahasan tradisional tentang partai, aktor politik dan konsestan politik. *Kelima*, CPM mengadaptasi teori marketing dan menyesuaikan teori-teori itu dengan hakekat yang berbeda dari dunia politik, yaitu konsep marketing murni tentang produk, harga, tempat dan promosi disesuaikan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan aktifitas politik elektoral.

2. Konsepsi Siyasah (Etika Politik Islam)

Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan cara menghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan politik. Untuk itu, perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam rangka mengurus urusan kaum muslimin, menasihatai pemimpin yang mendurhakai rakyatnya. Berkaitan dengan persoalan ini Nabi Muhammad SAW bersabda; “Siapa saja yang bangun pagi dengan gapaiannya bukan Allah maka ia bukanlah hamba Allah, dan siapa saja yang bangun pagi namun tidak memperhatikan urusan kaum muslimin maka ia bukan dari golongan mereka”.¹⁰

Keberadaan nabi Muhammad sebagai figur keteladanan dalam laku akhlaqi telah memberikan kontribusi penting dalam penetapan nilai-nilai etikayang dapat digugu secara langsung oleh manusia. Nabi Muhammad sendiri mengaku bahwa seluruh kandungan Al-Qur’an adalah cerminan ahlakunya. Dari sisi ini, Al-Qur’an berisi kitab yang mengajarkan etika, ahlak, atau moral bagi kehidupan manusia sehingga etika politik pun dirujuk kepada Al-Qur’an.

Etika Qur’ani mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan etika lain. Etika Qur’ani sekurang-kurangnya mempunyai lima ciri utama: *pertama*, Rabbani (berketuhanan); *kedua*, *manusiawi*; *ketiga*, universal; *keempat*, berkeseimbangan; dan *kelima*, realistis. Ciri Rabbani menegaskan bahwa etika politik Qur’ani membimbing manusia ke arahyang benar atau jalan yang lurus. Ciri manusiawi berarti etika politik Qur’ani yang memperhatikan dan memenuhi fitrah manusia serta menuntunnya agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ciri universal ialah etika politik Qur’ani membawa misi kasih sayang kepada ummat manusia di seluruh dunia, menegakkan kedamaian, menciptakan keamanan dan ketenangan baik secara individual maupun komunal. Ciri keseimbangan artinya

¹⁰ Hadits Riwayat Al hakim.

mengajarkan bahwa manusia memprioritaskan kepentingan ukhrawi tanpa melupakan kepentingan duniawi, memenuhi keperluan rohani tanpa mengabaikan keperluan jasmani. Sedangkan ciri realistik adalah etika politik Qur'ani memperhatikan kenyataan hidup manusia.

3. Politik Pencitraan dalam Demokrasi Prosedural

Negara demokratis adalah negara yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, yang salah satunya yaitu pemerintahan yang menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat, maka sudah menjadi keharusan jika rakyat diikutsertakan dalam kehidupan politik dan dilibatkan dalam kehidupan pemerintahan serta dalam proses pembentukan kebijakan publik.

Di dalam negara demokratis dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara, karena kebijaksanaan dan kebijakan itu menentukan hidup rakyat itu.¹¹

Dari sini, dapat digambarkan bahwa dalam kehidupan masyarakat demokratis dengan komposisi masyarakat yang begitu modern dan luas, semangat demokrasi “dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat” hanya berpeluang direpresentasi oleh partai politik, karena dengan mekanisme ini, partai politik selanjutnya merumuskannya sebagai usulan kebijakan dan kebijaksanaan. Usul kebijakan guna kepentingan kolektif ini dirumuskan dalam program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan sebagai kebijakan umum. Dengan demikian, tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. Ini menjelaskan bahwa keberfungsian partai politik akan terwujud dan terlaksana secara baik dan efektif jika berada dalam suatu negara yang demokratis.

¹¹ Deliar Noer, *Islam dan Politik*, (Jakarta: Yayasan Risalah, 2003), hlm. 206.

Demokrasi prosedural hadir sebagai alternatif dari demokrasi klasik/substantif yang hanya membicarakan tentang gagasan-gagasan dan norma-norma tanpa mengetahui kondisi riil. Demokrasi prosedural merupakan pelaksanaan teknis demokrasi riil di lapangan.

Dalam penerapannya ada tiga elemen penting yaitu; *Pertama*, Pemilu yang merupakan mekanisme kompetitif untuk memilih pemimpin secara sah yang melibatkan individu-individu tertentu untuk membuat keputusan lewat persaingan dalam memperoleh atau mendapatkan suara rakyat untuk mencapai amanat kekuasaan. *Kedua*, Parlemen/Dewan, tempat untuk menampung aspirasi rakyat sekaligus mengawasi dan mengontrol kebijakan dalam menjalankan pemerintahan yang terdiri dari wakil rakyat. *Ketiga*, Partai politik, yaitu sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan sama dan terorganisir dan berusaha untuk mencapainya dengan meraih atau mencari dukungan/ suara rakyat untuk memperoleh kekuasaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian fenomenologis yang akan membongkar paradigma, etika dan moralitas politik yang mendasari realitas politik pencitraan oleh politisi NTB. Penelitian ini dimulai dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara guna mendapatkan data-data utama dan pendukung tentang fakta-fakta nyata tentang politik pencitraan pada pemilihan Gubernur NTB, lalu dilanjutkan dengan merekonstruksi dengan menganalisa fenomena tersebut dengan konsepsi siyasah syar'iyah dan etika politik Islam.

Data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini ada dua kategori data yaitu data berbentuk fenomena politik pencitraan dan teorisasi etika politik dalam siyasah Islam. Data jenis pertama adalah data-data pengamatan dan wawancara tak terstruktur terhadap proses-proses politik elektoral baik menjelang pencalonan dan pasca pencalonan dan masa kampanye yang terjadi pada PILGUB 2018 dengan sumber data yaitu para calon kontestan peserta pemilihan Gubernur, para tim sukses dan data-data pendukung baik melalui media cetak dan elektronik, media sosial dan alat peraga kampanye. Sedangkan data teorisasi berupa teks akademik atau tulisan teoritik mengenai etika politik dan siyasah Islam yang diambil dari para teoritis, praktisi dan ahli-ahli politik dan juga teks buku-buku yang bertemakan Islam politik dan Etika politik.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap pertama, dengan menggunakan teknis dokumentasi, data-data yang terkait dengan konsep dasar Etika Politik yang digunakan di Indonesia akan dikumpulkan dari berbagai pemikiran

mengenai teori politik yang paling banyak dirujuk dan digunakan oleh para akademisi dan praktisi politik Indonesia. Akan dipilih para penulis yang otoritatif dalam berbicara mengenai politik yang dibandingkan dengan gagasan *non-mainstream* untuk melihat isu-isu besar yang menjadi perdebatan diantara para pemikir politik. Data-data tersebut akan diklasifikasi dan dikategorisasikan untuk kemudian dibuatkan skema umum yang menyatukan semua perbedaan dalam gagasan *mainstream*.

Pada tahap kedua, dengan menggunakan teknik observasi langsung, data-data dan informasi mengenai proses, prosedur dan mekanisme politik elektoral akan diambil dari dokumen-dokumen dan hasil wawancara tak terstruktur yang menjadi panduan dalam proses politik yang dilakukan oleh para politisi NTB.

Pada tahap ini juga secara simultan akan menggunakan teknik dokumentasi, rekaman proses dan perdebatan dalam proses tersebut juga akan dimunculkan guna menjangkau sebanyak mungkin informasi mengenai variabel Etika Politik Islam yang dimasukkan dalam perumusan dan juga dalam menganalisa politik pencitraan pada kontestasi pemilihan Gubernur di NTB.

C. Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis fenomena sistemik yang berusaha mengurai realitas politik pencitraan para politisi NTB dan menakarnya dengan analisis etika politik Islam. Analisis sistemik bersifat siklik dan tidak linier sebagaimana dalam analisis tradisional yang lebih dikenal dengan istilah analisis dekomposisional. Langkah kerja dalam analisis sistemik fenomenologi dimulai dengan pemetaan nilai-nilai etik dalam sistem sosial politik Islam untuk menemukan posisi penalaran yang benar di dalamnya. Pada tahap

selanjutnya dilihat dan dianalisis fakta-fakta fenomena politik pencitraan pada kontestasi pemilihan Gubernur NTB 2018 dengan basis penalaran Etika Politik Islam dalam rangka menemukan normalitas politik elektoral yang sesuai dan memenuhi semangat bernegara dan berbangsa termasuk semangat berpolitik yang islami.

D. Keabsahan Data

Validitas data berorientasi untuk membuktikan bahwa apa yang diperoleh oleh peneliti sesuai dengan apa yang didapatkan dalam penelitian, karena keabsahan data berkaitan dengan akurasi data yang diukur dari proses pengumpulan data yang tepat. Penelitian ini menggunakan proses triangulasi (proses pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan struktur lain di luar data utama dan pendukung sebagai pembanding data tersebut).

BAB IV

MENAKAR REALITAS POLITIK PENCITRAAN PADA PILGUB NTB 2018

A. Realitas Politik NTB Pada Pemilihan Gubernur 2018

Jelang Pilkada NTB 2018 mendatang. Sudah menjadi kebiasaan dalam kontestasi bahwa para politisi partai mulai melaksanakan ikhtiar politik guna berebut mendapatkan dukungan dari rakyat NTB untuk bisa menduduki kursi sebagai orang nomor satu dan dua di NTB.

Ketika mendekati prosesi pergantian kepemimpinan para figur dan elit politik lokal NTB maupun orang NTB yang menasional sudah mulai ramai melempar dan memainkan visi politik untuk mendapatkan simpati pemilih di pilgub NTB. Namun yang paling berat memang beban bayangan sosok M. Zainul Majdi yang kapasitasnya menjadi gubernur NTB dua priode berjalan sampai pilgub 2018 tentu menjadi ekspektasi besar yang harus minimal ditandingi oleh para bakal calon gubernur NTB selanjutnya.

Bagaimana tidak, selama memimpin NTB realitas sosial, ekonomi dan politik yang perkembangannya sangat pesat tentu akan menjadi *teststone* (batu uji) para bakal calon Gubernur NTB selanjutnya. Daerah NTB meraih banyak sekali penghargaan dari pemerintah sejak M. Zainul majdi (disapa TGB) memimpin. Sebut saja selain sukses menyelenggarakan MTQ Nasional XXVI tahun 2016, NTB di kepemimpinan TGB menerima Lencana Ksatria Bhakti Husada Arutala yang merupakan penghargaan atas jasa-jasanya dalam pembangunan bidang kesehatan. Penghargaan tersebut diberikan karena dinilai memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan bidang kesehatan di NTB dengan program revitalisasi Puskesmas dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar jamkesmas. Di penghujung tahun 2010 provinsi NTB banjir prestasi pembangunan seperti *The Best Province Tourism Depelovement* dan penghargaan di bidang pangan.

Realitas politik di NTB seperti di atas, tidak jauh berbeda dengan realitas politik di tempat lain dengan beragam rupa dan karakteristik politik yang melatari perjalanan pemerintahan di NTB dengan instrumen demokrasi prosedural yang menyuguhkan kontestasi-kontestasi dan suksesi-suksesi politik 5 tahunan. Banyak ragam postulat politik yang tersajikan baik politik identitas, politik dinasti dan politik pencitraan yang kadang-kadang dramatis.

Realitas di atas tidak bisa dipungkiri karena berjaln kelindan dengan politik kepentingan dalam rangka mendapatkan sahwat politik dalam kontestasi menjelang pilkada Gubernur NTB 2018. Untuk itu, instrument politik yang di sebut partai tidak bisa tidak berperan penting dalam rangka konstalasi politik di NTB.

Untuk mengurai lebih detail realitas politik NTB menjelang pemilihan Gubernur 2018, penulis terlebih dahulu menyajikan data dan fakta komposisi partai politik baik di legislatif DPRD NTB 2014 dalam bentuk tabel sebagai berikut;

No.	Nama Partai	Jumlah Kursi	Ket.
1.	Partai Golkar	11 Kursi	
2.	Partai Demokrat	8 Kursi	
3.	Partai Gerindra	8 Kursi	
4.	PKS	6 Kursi	
5.	PPP	6 kursi	
6.	PDIP	5 Kursi	
7.	PAN	5 Kursi	
8.	Hanura	5 Kursi	
9.	PKB	5 Kursi	
10.	NasDem	3 Kursi	
11.	PBB	3 Kursi	
Total		65 Kursi	100 %

Tabel 3 : Komposisi Kekuatan Partai Politik Berpotensi Mengusulkan Calon selain Calon Perseorangan.¹²

Dari data di atas, realitas politik partai terdeskripsi dengan baik bahwa potensi penjangkaran bakal calon gubernur pada kontestasi PILGUB 2018 NTB yang memungkinkan untuk mengusulkan adalah partai-partai yang harus berkoalisi di daerah NTB. Adapun persyaratan dukungan Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB baik jalur partai dan perseorangan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB dengan keputusan KPU NTB nomor 740/HM.02.Pu/52/KPU/IX/2017.¹³

Beberapa prasyarat substantif dari aturan di atas adalah dukungan untuk calon perseorangan harus mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 8,5 persen dari jumlah penduduk NTB yang mempunyai hak pilih dan termuat di DPT pada pemilihan umum sebelumnya. Dengan rasion DPT terakhir NTB berjumlah 3.568.594 jiwa, maka syarat bagi calon perseorangan adalah 303.331 orang pendukung yang harus tersebar di 50 persen jumlah kabupaten/kota di NTB. Dukungan yang dimaksud juga harus tertuang dalam foto kopi KTP elektronik atau surat keterangan dari Dinas Dukcapil sesuai Undang-undang. Sedangkan untuk dukungan partai diharuskan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi di DPRD. Untuk hasil pileg 2014, DPRD provinsi NTB berjumlah 65 kursi sehingga pasangan calon harus diusung sekurang-kurangnya 13 kursi baru kemungkinan partai atau gabungan partai mencalonkan kadernya secara nasional.

¹² *Ibid*

¹³ [www. suara NTB.com/news/2017](http://www.suara NTB.com/news/2017) tanggal 3 oktober 2017, diakses tanggal 15 Juli 2018.

B. Konfigurasi Politik NTB dan Politik Pencitraan Pada Pemilihan Gubernur 2018

Bola panas pemilihan kepala daerah (PILKADA) NTB sebentar lagi bergulir. Sejumlah kandidat calon sudah muncul ke permukaan. Secara tidak langsung mereka hendak mengatakan bahwa saya siap bertarung di medan laga. Waktu memang dirasa sangat cepat bergulir bagi calon-calon kontestan gubernur dan wakil gubernur menjelang pilgub NTB 2018. Mereka mulai memanaskan motor penggerak atau partai politik sedini mungkin untuk menghadapi pilgub tahun depan dan menjadi pilihan setiap calon yang ingin definitif siap bertarung merebut kursi NTB 1 dan 2. Calon-calon yang muncul memang sudah banyak memperkenalkan dirinya melalui baliho, stiker, brosur, kalender dan lainnya. Baliho raksasa yang dipasang dipinggir jalan-jalan utama menjadi pemandangan yang lumrah di setiap jalan strategis bakal-bakal calon.

Bakal-bakal calon gubernur NTB 2018 sudah memulai konsolidasi dan silaturahmi politik guna mencari dukungan baik kepada partai maupun terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Bercanda gurau dengan masyarakat akar rumput NTB dalam upaya mendengarkan keluh kesah, suka, duka dan aspirasi menjadi jalan yang dirasa sangat efektif dalam upaya meraih simpati dan dukungan masyarakat. Mau tidak mau dan suka tidak suka para calon kontestan harus berbuat lebih untuk mencari simpati masyarakat NTB hari ini, pasalnya masyarakat NTB umumnya sudah memiliki referensi kehidupan politik guna memilih pemimpin yang cocok dan ideal untuk menggantikan M. Zainul Majdi.

Menilik di tujuh kabupaten kota di NTB tahun 2015 yang lalu yang sudah mencapai klimaks dengan ditetapkannya pasangan calon terpilih. Kini parpol (partai politik) di atas mulai menatap pilkada NTB 2018. Sejumlah figure telah mulai berkomunikasi dengan parpol tertentu untuk suksesi politik pemilihan gubernur NTB 2018 yang tahapan dan rencananya akan digelar

berbarengan dengan pilkada kota Bima, kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat. Pemungutan suara direncanakan akan digelar pada Juni 2018.¹⁴

Partai-partai politik sudah tentu mulai menatap ajang 2018. Sejumlah parpol seperti PKS misalnya mengakui sudah mulai mempersiapkan diri dengan mulai menjaring figur dari internal maupun dari eksternal PKS untuk nanti disiapkan tampil pada pilkada NTB 2018. PKS sudah mulai melakukan penjaringan untuk mengelaborasi kemungkinan mereka mengusung figur dari internal maupun eksternal PKS. Dari internal partai, PKS membayangkan adanya peluang untuk mengusung kembali salah satu dari duet pasangan Suryadi Jaya Purnama dan Johan Rosihan yang mereka usung pada pilgub 2013. Di samping kemungkinan kader partai yang bereputasi nasional yang juga diminta tampil di panggung NTB seperti Fahri Hamzah dan Zulkieflimansyah.¹⁵

Namun yang mengejutkan, PKS juga membuka peluang untuk sejumlah figur bakal calon gubernur yang memungkinkan diusung PKS adalah Bupati Lombok Tengah H.M. Suhaili FT dan walikota Mataram M. Ahyar Abduh yang notabene kader partai lain termasuk kemungkinan mengusung mantan Bupati Lombok Timur M. Sukiman Azmi dan mantan Danrem Lalu Rudy Ilham Srigede dari militer.

Selain PKS, parpol lain seperti PAN juga sudah mulai menyiapkan diri untuk kontestasi pilgub NTB 2018 dengan sangat percaya diri mengusung Ketua DPW PAN NTB H. Muazzim Akbar untuk mempersiapkan diri walaupun menjadi bakal calon Wakil gubernur NTB 2018 dan itu atas permintaan Ketua umum DPP PAN.

Di lain tempat, partai Demokrat juga sudah mulai membangun komunikasi intensif dengan PKS dan partai lain untuk pilgub NTB 2018 dengan mengusung Sitti Rohmi Djalilah sebagai bakal calon gubernur NTB.

¹⁴ Wawancara dengan Yan Marli Komisioner KPU NTB tanggal 8 Juni 2018.

¹⁵ Wawancara dengan Abdul Hadi selaku Ketua DPW PKS NTB, tanggal 10 Mei 2018.

Di luar itu beberapa calon pun bermunculan seperti Bupati Lombok Timur aktif Ali BD yang rencananya akan berpasangan dengan Putu Selly Andayani yang rencananya akan diusung oleh PDIP. Keputusan PDIP mengusung Ali BD dan Selly didasarkan pada aspirasi para kader PDIP dalam rapat kerja daerah (Rakerda II) pengurus PDIP se-Kabupaten/Kota di NTB. Argumen politis para tokoh PDIP NTB menyatakan bahwa kedua bakal calon itu dianggap cukup relevan untuk memimpin NTB lima tahun ke depan dengan kapasitas pengalaman Ali BD sebagai Bupati Lombok Timur dua kali dan Putu Selly yang birokrat. Tapi dengan pertimbangan lain juga, karena PDIP hanya mendapatkan 5 kursi di NTB maka mau tidak mau harus menggandeng partai lain untuk mencapai 13 kursi sebagai syarat mutlak pengusungan calon gubernur dan wakilnya.¹⁶

Sampai penelitian ini dilakukan, sudah terjadi pengerucutan dukungan partai-partai politik NTB dalam mengusung bakal calon gubernur dan wakil gubernur dalam kontestasi pilgub NTB bahkan sudah ada partai dan gabungan partai yang mendeklarasikan pasangan calon yaitu;

- a. Gabungan Partai Gerindra, PPP dan PAN yang mengusung pasangan Ahyar Abduh dan Mori Hanafi.
- b. Gabungan Partai Golkar, PKB dan NasDem yang telah final mendukung calon pasangan Suhaili FT dan Muhammad Amin

Partai-partai lain yang belum menentukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur adalah partai Demokrat, PKS, Hanura dan PBB.

Bacaan lain dalam konfigurasi politik menjelang pilgub NTB 2018 adalah potensi munculnya dua pasangan calon secara *head to head* dengan melihat dinamika politik dan konstalasi nasional. Dua koalisi besar minus partai demokrat akan bertarung memerebutkan kursi nomor satu dan dua di NTB. Untuk Pilgub NTB misalnya, apabila Walikota Mataram Ahyar Abduh mendeklarasikan pencalonannya berpasangan dengan Mori Hanafi yang

¹⁶ Wawancara dengan Rahmat Hidayat selaku Ketua DPD PDIP NTB tanggal 10 Januari 2018

kapasitasnya kader Gerindra pada 1 Oktobeber 2017, maka *head to head* akan terjadi dengan dipastikan Koalisi Indonesia hebat akan mengusung pasangan Ali BD dan Gede Sakti Amir Murni.¹⁷

Berikut profil dan aktivitas politik singkat seluruh bakal calon gubernur NTB menjelang pemilihan gubernur 2018 dan jabatan yang sedang diemban pada priode dimulainya kontestasi pilgub NTB 2018 beserta visi misi dan konstruksi citra politik yang dibangun oleh masing-masing calon:

1. Pasangan H. Moh. Suhaili Fadhil Thohir, SH dan Muhammad Amin

Suhaili lahir di Lombok Tengah pada 31 Desember 1966 dengan riwayat pendidikan SDN 1 Bodak tahun 1980, SMPN 1 Praya tahun 1983, SMAN 1 Mataram tahun 1986 dan Universitas Islam al-Azhar Mataram pada tahun 2000. Aktivitas sosial keagamaan dan kemasyarakatan menjadi konsentrasi Suhaili yang notabene anak kandung dari pendiri YATOFA Bodak Praya, sehingga Suhaili menjabat dan mengelola Kapotren sebagai sekretaris yayasan.

Pada ranah politik, aktivitas politik Suhaili mulai dengan menjabat sebagai fungsionaris partai Golkar selaku Wakil Ketua Harian DPD I Golkar provinsi NTB. Dilanjutkan dengan terpilihnya sebagai Ketua DPR Provinsi NTB periode 2004-2009 dan priode 2009-2014. Di tengah perjalanan sebagai Ketua DPRD NTB, Suhaili mencalonkan diri dan memenangkan kontestasi menjadi Bupati Lombok Tengah priode 2010-2015 di tahun yang sama Suhaili pun menjadi Ketua DPD II Golkar Lombok Tengah dan setahun selanjutnya menjadi Ketua DPD I Golkar NTB. Sampai penelitian ini dilakukan Suhaili masih menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah priode kedua yaitu priode 2015-2020. Padahal belum genap 2 tahun memimpin Lombok Tengah priode kedua, Suhaili sudah siap-siap mencalonkan diri menjadi Gubernur NTB 2018.

¹⁷ Republika online, *Pilkada NTB 2018 Diprediksi Berlangsung Head to Head*, tanggal 19 Juni 2018.

Ini juga yang menggambarkan laku dramatis politisi NTB menjelang pilgub 2018.

Fakta ini terjawab dengan dideklarasikannya paket pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTB periode 2018-2023 yakni pasangan H.Moh. Suhaili FT dengan H. Muhammad Amin pada tanggal 30 September 2017 bertepatan dengan 10 Muharram 1439 Hijriah yang dirangkai dengan acara tabligh akbar “Rahman dan Rahim” di Lombok Tengah.

Pasangan di atas secara resmi diusung oleh tiga partai politik yaitu partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan partai Nasional Demokrat (NasDem). Dengan adanya dukungan itu membuat paket pasangan bakal calon tersebut berjanji akan tuntaskan pekerjaan rumah yang tersisa selama kepemimpinan TGB-Amin yang menjadi harapan warga NTB. Dengan bahasa yang sangat politis Suhaili menyatakan dihadapan ribuan massa mendeklarasikan dan memastikan bahwa Muhammad Amin akan mendampingi dalam membangun, bersatu, ikhtiar menuju NTB sejahtera. Sebagai Ketua DPD Golkar NTB, juga sebagai Bupati Lombok Tengah sekaligus sebagai bakal calon gubernur NTB, Suhaili berjanji lagi dengan siap menuntaskan pekerjaan TGB-Amin dan siap mengabdikan diri sebagai khadam (pembantu) masyarakat NTB.¹⁸

Dalam kalkulasi politik, paket Suhaili-Amin bisa dikatakan sudah final tinggal menunggu dukungan tertulis dari masing-masing DPP yang sudah menyepakati dan berkomunikasi intensif. Karena di samping adanya kesepahaman visi dan misi, partai pengusung juga memang secara faktual kedua pasangan ini berkapasitas sebagai Ketua DPD partai dimana Moh. Suhaili menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar NTB sedangkan Muhammad Amin mengemban amanat sebagai

¹⁸ <https://kicknews.today/2017/09/30>. Diakses tanggal 30 Juni 2018

Ketua DPW Nasdem NTB yang secara komunikasi politik ke DPP sangat mudah dan memungkinkan untuk direstui. Belum lagi dukungan dari DPW PKB NTB juga menyatakan dukungan yang secara kalkulasi politik yang mempersyaratkan 13 kursi, maka sangat memungkinkan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Muh. Suhaili-Muhammad Amin akan final. Pada akhirnya paket pasangan Suhaili-Amin mendaftarkan ke KPU beserta partai pengusung sampai disahkan oleh KPU NTB untuk ikut ambil bagian dalam kontestasi PILGUB NTB 2018 dengan nomor urut satu (1).

Adapun visi misi dan citra politik yang dibangun oleh calon nomor urut 1 (pasangan Suhaili-Amin) ini terurai dari visi dan misinya yaitu NTB sejahtera yang diderivasi dengan misi dan tolak ukur yang jelas antara lain; (1) peningkatan mutu pendidikan sekolah, (2) peningkatan kapasitas SDM melalui vokasi (diklat) dan sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, (3) bantuan pendidikan bagi murid kurang mampu dan berkebutuhan khusus, (4) pemantapan partisipasi sekolah dan penanggulangan *drop out* sekolah, (5) pencegahan dan perlindungan anak sekolah terhadap narkoba, (6) pengembangan dan pembinaan generasi muda dan prestasi olahraga, dan (7) kemitraan pemerintah-swasta untuk meningkatkan daya saing SDM.

Idealitas visi misi di atas sewajarnya menjadi garis perjuangan suksesi pasangan calon Suhaili-Amin dalam kampanye dan pembangunan citra politik dan politik pencitraan yang dilakoni oleh calon dan tim suksesnya. Idealitas ini senada dengan tanggapan dan pendapat Ahmad (Memet) salah satu tim sukses pasangan Suhaili-Amin juga pengurus partai NASDEM pengusung pasangan ini yang menyatakan sebagai berikut:

“Normatifnya, pasangan Suhaili-Amin dengan visi misi yang diusung kalau menggunakan analisis SWOT maka sangat laik

dan cocok sekali menjadi Gubernur-Wakil Gubernur NTB karena visinya sangat terukur dan mudah dipahami, belum lagi modalitas pribadi mereka yang memiliki basis pemilih yang jelas. Maka, harga mati bagi kami untuk memasarkan dengan berbagai cara tentang keunggulan pasangan Suhaili-Amin dalam kontestasi PILGUB NTB 2018. Di samping itu, tentu keharusan bagi kami untuk mencitrakan pasangan Suhaili-Amin adalah yang terbaik dibanding pasangan calon lain. Pak Suhaili adalah pria keturunan Tuanguru Bodak (YATOFA), maka trah tuanguru-an melekat kepadanya. Dengan itu kami mencitrakan dia sebagai orang yang agamais”¹⁹

Penjelasan dari Ahmad (Memet) menggambarkan bahwa pasangan Suhaili-Amin merupakan pasangan yang memiliki kredibilitas yang baik dengan visi misi yang terukur dan *applicable* dan cepat dicerna oleh pemilih. Peneliti menggarisbawahi diksi pencitraan dengan berbagai cara yang nantinya dianalisis pada fakta politik pencitraan di sub-bab di bawah.

Senada dengan hasil wawancara di atas adalah pendapat Zainuri Ali yang memberikan argumentasi lain tentang kelebihan pasangan Suhaili-Amin dan cara mencitra politik kandidat kepada masyarakat NTB adalah;

“Realitasnya bahwa pasangan Suhaili-Amin memiliki modalitas sosial dan politik yang mumpuni karena Cagub Suhaili berpengalaman menjadi Bupati Lombok Tengah dua priode berjalan dan Cawagub Muhammad Amin adalah Wakil Gubernur NTB petahana yang memiliki basis massa yang jelas terutama untuk wilayah pulau Sumbawa. Jadi, mencitrakan mereka dengan dua manusia yang sempurna modal politik dan kepribadian akan kami lakukan dengan bentuk yang beragam dan meyakinkan pada segmen-segmen pemilih. Belum lagi pasangan Suhaili-Amin sama-sama menempati posisi ketua umum Dewan Pengurus

¹⁹ Wawancara dengan Ahmad (Memet), salah satu tim sukses pasangan Suhaili-Amin di Praya pada tanggal 23 juni 2018.

Wilayah partai Golkar dan NasDem, maka agak mudah bagi kami untuk mem”branding” keduanya sebagai politisi yang teruji”²⁰

Pendapat lain juga disampaikan oleh Saifulloh salah satu tim sukses pasangan Suhaili-Amin yang mendeskripsikan tentang citra politik dan politik pencitraan pasangan calonnya dengan menyatakan bahwa;

"Pasangan Suhaili-Amin dengan pengalaman masing-masing membangun daerah sangat berhasil. Bupati Suhaili di Lombok Tengah telah memberi kontribusi sangat banyak terutama pemerataan infrastruktur jalan dan lain-lain. Bahkan pak Suhaili dan kami (tim sukses) membuat adagium bahwa "jangan mati dulu warga Lombok Tengah sebelum menikmati infrastruktur jalan di seluruh Lombok Tengah yang sangat mulus". Ini menggambarkan semangat kami dari tim sukses untuk memastikan politik pencitraan yang baik-baik bagi pasangan calon kami."²¹

Dari beberapa hasil wawancara di atas, peneliti menangkap beberapa hal yang menjadi catatan dalam citra politik dan politik pencitraan yang dibangun oleh pasangan calon nomor urut 1 (Suhaili-Amin) yaitu upaya pencitraan yang dilakukan dengan berbagai cara dengan memaksimalkan peran tim sukses dalam menjalankan aktivitas politik pencitraan mulai dari men-personifikasi Cagub Moh.suhaili yang agamais dengan surban dan peci putih dengan pesan bahwa dia merupakan keturunan dari ulama dan Tuanguru Fadhil Thaohir pemilik pondok pesantren besar di Lombok yaitu YATOFA. Pencitraan lain adalah keberhasilan Cagub Moh. Suhaili dalam membangun Lombok Tengah selama menjadi Bupati Lombok Tengah dengan klaim pembangunan infrastruktur jalan hanya pada priode dia menjadi Bupati.

²⁰ Wawancara dengan Zainuri Ali, Tim Sukses pasangan Suhaili-Amin di Mataram tanggal 24 Juli 2018.

²¹ Wawancara dengan Saifulloh, tim sukses pasangan Suhaili-Amin pada tanggal 26 Juli 2018

2. H. Ahyar Abduh dan Mori Hanafi

Ahyar Abduh lahir di Mataram pada tanggal 20 oktober 1960. Ahyar mengenyam pendidikan di SDN 1 Dasan Agung tahun 1971, dilanjutkan pada Madrasah Tsanawiyah NW Pancor pada tahun 1974 dan pada Madrasah Aliyah NW Pancor pada tahun 1977.

Karir politik Ahyar dimulai dari menjabat sebagai kepala Sekretariat DPD Golkar Provinsi NTB pada tahun 1993, kemudian menjadi anggota DPRD Kotamadya Dati II mataram periode 1994-1997 dan kedua kali pada periode 1997-1999. Selanjutnya menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Mataram periode 1999-2004. Pada 2004-2005 Ahyar menjabat sebagai Ketua DPRD kota Mataram. Pada karir selanjutnya Ahyar diangkat menjadi Wakil Walikota Mataram periode 2005-2010. Pada jabatan selanjutnya Ahyar melanggang menjadi Walikota Mataram priode 2010-2015 dan terpilih kembali menjadi walikota Mataram periode selanjutnya yaitu 2016-2021.²² Belum lagi masa jabatan berakhir, Ahyar Abduh sudah melirik untuk ikut serta dalam kontestasi politik prosedural pemilihan Gubernur NTB 2018.

Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Ahyar Abduh-Mori Hanafi secara resmi telah mendapatkan dukungan dari partai Gerindra. Pasangan yang sudah lebih dulu juga didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi menerima dukungan dan rekomendasi dukungan definitif dari partai berlambang kepala burung Garuda emas itu.

Rekomendasi dukungan yang langsung ditandatangani oleh Prabowo Subianto dan sekretaris jenderal DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memastikan juga pasangan Ahyar Abduh-Mori Hanafi memenuhi syarat untuk mendaftar di KPU NTB karena telah mencukupi 13 kursi dukungan di DPRD NTB. Partai Gerindra dengan 8 kursi dan PPP dengan 5 kursi sudah memenuhi persyaratan dukungan untuk pencalonan sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023. Hingga

²² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2018.

akhirnya pasangan Ahyar-Romi resmi mendaftar ke KPU Provinsi dan disahkan menjadi peserta PILGUB NTB 2018.

Visi misi dan citra politik yang dibangun oleh calon nomor urut 2 (pasangan TGH. Ahyar Abduh-Mori Hanafi) yaitu dengan slogan "NTB untuk Semua" yang disandarkan kepada semangat dan komitmen kepala daerah bagi warganya. Misi dan program unggulan calon nomor urut 2 ini antara lain; (1) NTB Toleran: Mewujudkan masyarakat NTB yang disegani, ramah dan bersahabat, (2) NTB Aman: Pencegahan tindak kriminal (Cegah Kriminal), (3) NTB Eksis: Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di tengah-tengah masyarakat, (4) NTB Makmur: Perwujudan kemakmuran nyata di Desa dan Kota, (5) NTB Woouw: Pengembangan pariwisata massal berkelanjutan yang berkeseimbangan dengan pariwisata halal, tematik dan minat khusus pada potensi-potensi wisata lain, dan (6) NTB Berderma: Menjadikan NTB sebagai gudang pangan dan gudang daging nasional.

Turunan ideal dari visi misi calon nomor urut 2 pasangan Ahyar-Mori terefleksi menjadi acuan bagi para tim sukses dalam rangka mencitrakan kandidat nomor urut 2 untuk dikampanyekan kepada pemilih NTB. Tentu saja pasangan calon ini ideal bagi para tim sukses mereka. Idealitas ini diuraikan dengan gamblang oleh Muti'ah Murni selaku juru bicara pasangan Ahyar-Mori yang menyatakan bahwa:

“Pasangan Tuanguru Ahyar dan Pak Mori merupakan pasangan yang ideal bagi NTB karena merepresentasikan *ulama-umara* yaitu H. Ahyar Abduh yang disandingkan dengan Mori Hanafi yang politisi dari partai Gerindra dan juga mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB. Basis massa pasangan Ahyar-Mori yang merata di semua kabupaten kota di NTB dan menjadi pasangan ideal karena perwakilan dari dua pulau (Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa). Jadi kami harus men”*branding*” calon nomor urut 2 sebagai calon yang sangat ideal bagi NTB karena ketokohan Tuanguru-nya dan kematangan politik calon wakilnya. Kami akan melakukan segala upaya untuk merebut hati pemilih terutama dengan mengkampanyekan pasangan nomor urut dua yang merupakan tokoh terbaik NTB saat ini

yang layak menggantikan TGB karena satu-satunya Calon yang memiliki predikat Tuanguru.”²³

Narasi dari Muti’ah Murni menjelaskan bahwa pasangan Ahyar-Mori merupakan pasangan yang memiliki kredibilitas dan elektabilitas yang baik dengan visi misi yang nyata dan mencitrakan pasangan calon Gubernur yang memiliki ketokohan Tuanguru di antara calon yang lain.

Wawancara lain adalah argumentasi tentang kelebihan pasangan Ahyar-Mori dan strategi membangun citra politik kepada pemilih NTB adalah Bapak Munawar Harun yang menyatakan;

“Pasangan Ahyar-Mori adalah pasangan serasi, karena pasangan ini merupakan perwakilan ideal bagi topografi penduduk NTB yang terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Karena sebaran penduduk terbesar di NTB ada di pulau Lombok, maka Tuanguru Ahyar sangat cocok jadi Gubernur dan Pak Mori jadi wakilnya. Belum lagi dukungan partai yang paling besar ke calon kami yaitu gabungan partai Gerindra, PDIP, PPP, PAN, Hanura dan Partai Bulan Bintang yang sangat kompak mendukung pasangan ini. Kami akan memperkuat mesin partai untuk mendulang suara terbanyak nantinya. Intinya, kami dari tim sukses sangat PD “percaya diri” dengan infrastruktur dan suprastruktur politik untuk memenangkan pasangan Ahyar-Mori. Untuk itu, kami melakukan kampanye dengan segenap kemampuan termasuk dengan cara mempersinifikasi ketuanguan Pak Ahyar, disamping penguatan pesan di panflet dan baliho-baliho yang menggambarkan kedekatan calon juga dengan masyarakat melalui foto-foto.”²⁴

Pendapat lain juga disampaikan oleh Hidayatulloh salah satu tim sukses pasangan Ahyar-Mori yang mendeskripsikan tentang citra politik dan politik pencitraan pasangan calonnya dengan menyatakan bahwa;

"Cagub Tuanguru Ahyar memiliki latar belakang yang kuat di kota Mataram, karena hampir karir politik terbanyaknya menjadi

²³ Wawancara dengan Muti’ah Murni, Jurubicara pasangan Ahyar-Mori di Mataram pada tanggal 26 juni 2018.

²⁴ Wawancara dengan Munawar Harun, Tim Sukses pasangan Ahyar-Mori di Mataram tanggal 20 Juli 2018.

Wakil Walikota dan Walikota di Mataram. Sisi lain, dia adalah putra kelahiran Lombok Timur dan istrinya asli Lombok Tengah sehingga peluang untuk meraup suara dari Pulau Lombok akan *tercover*. Begitu juga dengan Pak Mori yang notabene putra asli Bima dan satu-satunya dari perwakilan Bima-Dompu, maka potensi untuk mendulang suara di pulau Sumbawa menjadi lebih besar."²⁵

Selain kedua tim sukses pasangan Ahyar-Mori di atas, Pak Hadisan yang merupakan tim sukses pasangan nomor urut 2 ini juga menyampaikan bahwa;

"Pengalaman memimpin Cagub Ahyar sangat lama dan tidak diragukan lagi sehingga sangat menguasai medan suksesi. Pak Mori juga begitu, kader partai Gerindra yang kritis dan solutif ini sangat berpengalaman pada ranah legislatif. Modalitas pengalaman keduanya menyemangati kami untuk sepenuh hati untuk membangun citra positif dengan menpublikasi dengan segala bentuk alat peraga kampanye untuk meyakinkan pemilih."²⁶

Peneliti mencermati beberapa hal yang menjadi catatan bahwa politik pencitraan yang dibangun oleh pasangan calon nomor urut 2 (Ahyar-Mori) beserta tim suksesnya yaitu berupaya dengan berbagai cara menjalankan aktivitas politik pencitraan mulai dari men-personifikasi Cagub Ahyar Abduh sebagai orang yang agamais dan satu-satunya calon Gubernur yang bergelar agama Tuanguru. Pencitraan dalam bentuk lain adalah berkaitan dengan melekatnya pribadi Cagub dan Cawagub nomor urut 2 sebagai representasi dan keterwakilan semua wilayah kabupaten kota di NTB. Di samping itu, kepercayaan diri pasangan calon nomor urut 2 semakin membunchah dikarenakan oleh gabungan partai pengusung yang sangat besar seperti yang telah dijelaskan di atas.

²⁵ Wawancara dengan Hidayatulloh, tim sukses pasangan Ahyar-Mori pada tanggal 24 Juli 2018

²⁶ Wawancara dengan Hadisan, tim sukses pasangan Ahyar Mori pada tanggal 24 Juli 2018.

3. Zulkeiflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah

Zulkeiflimansyah lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 18 Mei 1972. Akrab disapa Bang Zul , pria satu ini tidak hanya sebagai politisi handal namun orang yang sukses di dunia pendidikan. Berawal dari kemenangannya di berbagai lomba di kota kelahirannya, Zulkeiflimansyah akhirnya terpilih menjadi wakil pertukaran pelajar antara Indonesia dan Australia. Setelah hamper setahun mengenyam pendidikan di Darwin High School tahun 1989. Pulang dari Australia, bang Zul langsung masuk Universitas Indonesia dan meraih gelar Sarjana Ekonomi tahun 1995. Dua tahun kemudian, ia meraih gelar Masternya di bidang marketing di strathlyde Business School di University of Strathclyde di UK. Tak berhenti sampai di situ, tahun 1998 Zulkeiflimansyah kembali mengoleksi gelar Master di bidang *Industrialization, Trade and Economic Policy* yang berlanjut ke jenjang Doktoral di departemen yang sama pada tahun 2001.

Terjun ke ranah politik, Zulkeiflimansyah mendapat banyak dukungan. Ia dipercaya untuk duduk menjadi wakil rakyat di DPR RI periode 2004-2009. Selanjutnya digandeng Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Zulkeiflimansyah diangkat lagi mewakili daerah pemilihan Banten 2. Selain menjadi sekretaris Fraksi PKS MPR, Zulkeiflimansyah juga tergabung di komisi VII yang membahas sumber daya energi dan mineral, riset serta teknologi dan lingkungan hidup. Kemudian per November 2011 dia diamanatkan juga menjadi Wakil Ketua di komisi XI sampai 2014. Dan pada periode 2014-2019, Zulkeiflimansyah mendapatkan kepercayaan kembali untuk menjadi wakil ketua fraksi PKS Bidang Litbang.²⁷

Dari sekian nama yang mulai bermunculan di Pilgub NTB 2018, nama politisi PKS ini disebut sebagai kandidat terkuat untuk terpilih menjadi Gubernur NTB pada pilkada serentak 2018. Alasan yang paling

²⁷ <https://www.wikidpr.org/>, diakses tanggal 18 Juli 2018.

kencang disimpulkan pengamat bahwa pertama, sosok Zulkeiflimansyah secara komunikasi politik pernah terlontar dukungan dari TGB selaku Gubernur NTB (petahana). Kedua, selain didukung oleh TGB sebagai tokoh berpengaruh di NTB, Zulkeiflimansyah juga dirasa tepat melanjutkan kepemimpinan TGB untuk terus memajukan provinsi dengan 10 kabuapten/kota dengan *track record* yang mumpuni. Rekam jejak Zulkeiflimansyah terang benderang sebagai tokoh nasional menjabat tiga periode di DPR RI.

Dukungan-dukungan tersebut menjadi pemicu Zulkeiflimansyah untuk serius mencalonkan diri menjadi bakal calon Gubernur NTB 2018-2023 dengan visi dan misi besar melanjutkan ikhtiar TGB dalam pembangunan NTB yang sudah *on the track* yang harus dilanjutkan agar NTB melejit. Meskipun sampai penelitian ini dilaporkan belum final dan pasti dukungan partai terhadap Zulkeiflimansyah. PKS tentu sebagai partai pengusung harus berkoalisi dengan partai lain guna mencukupi pencalonannya. Peluang yang masih terbuka adalah kemungkinan koalisi PKS dengan partai Demokrat yang sama-sama mengusung calon tetapi belum pasti menjadi bakal calon NTB 1 atau NTB 2.

Sitti Rohmi Djalilah lahir di Pancor pada tanggal 29 November 1968. Dia menempuh pendidikan dasar dan menengahnya di SDN 3 Mataram tahun 1951, kemudian SMPN 2 Mataram tahun 1984 dan SMAN 1 Mataram tahun 1987. Seusai SMA, Rohmi melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Surabaya (ITS) lulus tahun 1992, kemudian S2 di Universitas Negeri Surakarta dan S3 di Universitas Negeri Jakarta.

Adapun pengalaman dan karir Rohmi dimulai dengan menjadi General Foreman di PT. Newmont Nusa Tenggara tahun 2000-2009, kemudian hijrah ke dunia politik dan pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur periode 2009-2013 dan sejak tahun 2012 hingga sekarang aktif di dunia akademik dengan jabatan Rektor di Universitas

Hamzanwadi Selong.²⁸ Kakak kandung Gubernur petahana M. Zainul Majidi ini secara resmi diusung oleh PB NW untuk maju menjadi bakal calon Gubernur NTB periode 2018-2023 di samping dukungan partai Demokrat NTB.

Sitti Rohmi Djalilah menyatakan kesiapannya bertarung di pemilihan kepala daerah Gubernur NTB 2018 mendatang. Tak hanya bergerak di media sosial, saat ini sejumlah spanduk dan baliho telah terpasang di sejumlah titik mulai dari wilayah Lombok Timur sampai Mataram. Baliho yang bertuliskan mulai dari *tagline* “NTB untuk Kita” hingga “Teruskan ikhtiar TGB” menjadi jargon yang diusung oleh Rohmi. Keinginan Rohmi menjadi gubernur tidak terlepas dari beberapa alasan diantaranya yaitu ada restu dari dari suami yang menjabat sebagai ketua DPRD Lombok Timur dan juga dukungan dari PB NW Pancor dan partai Demokrat.

Namun, apakah Rohmi maju pada Pilkada Gubernur NTB mengincar posisi Gubernur atau Wakil Gubernur dari partai Demokrat dan PB NW menjelaskan akan dianalisa berdasarkan elektabilitas pada hasil survei, kemudian dilanjutkan dengan respon masyarakat dan dukungan formal dari partai politik selain partai Demokrat yang pengusung utama. Hingga akhirnya secara definitif pencalonan pasangan Zul-Rohmi disahkan KPU Provinsi NTB untuk ikut dalam kontestasi dengan nomor urut 3.

Pasangan calon dengan nomor urut 3 (Dr.H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc – Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah) ini mengambil slogan visi mewujudkan NTB yang Gemilang. NTB Gemilang adalah NTB yang punya daya saing, sekaligus pada saat yang sama menjadi rumah besar yang nyaman, hangat, dan penuh kekeluargaan buat kita bersama.²⁹ Adapun turunan dari visi misi pasangan Zul-Rohmi terekam dalam program-program unggulan yaitu; (1) Pertumbuhan ekonomi berbasis pada kualitas yang

²⁸ <http://www.info.pilkada.ntb.info/2018/06/14>, diakses tanggal 21 Juni 2018.

²⁹ Petikan pidato penyampaian visi misi Cagub Zulkieflimansyah pada debat terbuka pertama di Hotel Lombok raya, Sabtu 12 Mei 2018.

tinggi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata antar wilayah, berpihak pada kaum miskin, pemberdayaan sumber daya lokal, produktivitas berdaya saing, dan derajat kesehatan yang tinggi, (2) Pendidikan keahlian ganda diupayakan melalui pembangunan pusat keunggulan pada pesantren dan sekolah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian ganda (*multiskilled*) dan kompetitif pada zaman *now*, dan (3) *Morality* (peningkatan Iman dan amal sholeh) melalui pembentukan karakter (*character building*) yang berbasis pada keagamaan dan kebangsaan.

Visi misi calon nomor urut 3 pasangan Zul-rohmi tentu menjadi acuan bagi para tim sukses dalam rangka *branding* kandidat nomor urut 3 untuk mengambil hati masyarakat NTB. Dukungan dari tim sukses menguraikan dengan tegas pasangan ideal ini yaitu pandangan dari Asrorul Hadi yang merupakan tim sukses sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Umum DPC Demokrat kabupaten Lombok Tengah dengan menyatakan bahwa:

“Pasangan Zulkieflimansyah dan Sitti rohmi Djalilah adalah pasangan yang ideal dan serasi bagi NTB karena merepresentasikan sosok Bapak dan Ibu bagi sebuah daerah. Pasangan ini juga menawarkan keterwakilan dari dua pulau (Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa). Beruntungnya, secara demografi dan topografi politik, pasangan nomor urut 3 saja yang komposisinya memberikan posisi calon Gubernur NTB dari pulau Sumbawa yang notabene lebih kecil penduduk dan pemilihnya dibanding jumlah pemilih di pulau Lombok. Jadi sangat mudah bagi kami untuk men”*branding*” calon nomor urut 3 sebagai calon yang satu-satunya memberi ruang bagi Calon Gubernur dari pulau Sumbawa. Hal lain yaitu, pada calon dengan nomor urut 3 ini saja yang memberi ruang pada keterlibatan politik perempuan. Hal ini menjadi nilai tambah bagi kami (tim sukses) untuk mencitrakan seluas-luasnya keterwakilan perempuan ini. Belum lagi, kedekatan emosional cawagub nomor urut 3 dengan Gubernur 2 priode NTB yaitu TGB Zainul Majdi yang merupakan adik kandung dari Sitti Rohmi. Salah satu pencitraan politik yang mumpuni adalah

dengan men-*branding* pasangan Zul-Rohmi yang memiliki kedekatan emosional dengan NW Pancor dan TGB³⁰

Argumentasi dari Asrorul Hadi menjelaskan bahwa pasangan Zul-Rohmi merupakan pasangan yang memiliki elektabilitas dan akseptabilitas yang baik dengan afiliasi organisasi keagamaan terbesar di NTB.

Hal lain yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah suksesi kontestasi pemilihan kepala daerah seperti PILGUB NTB adalah argumentasi tentang pengiklanan personal atau personal branding dari pasangan calon. Itu juga yang diinisiasi oleh pasang calon Zul-Rohmi dengan strategi membangun citra politik seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Ziadi yang menyatakan;

“Zul-Rohmi adalah pasangan kompak, karena pasangan ini memiliki level intelektualitas yang memadai dari sisi akademik yang secara tidak langsung berperan penting dalam upaya melanjutkan ikhtiar TGB Zainul Majdi, yang mana NTB hanya membutuhkan usaha-usaha lanjutan dari keberhasilan yang sudah dicapai oleh Gubernur sebelumnya. Walaupun hanya diusung oleh dua partai yaitu partai Demokrat dan PKS, tetapi bobot personal dari pasangan nomor urut 3 ini cukup untuk mengambil hati para pemilih di NTB. Kami berkeyakinan dengan mesin partai yang terbatas, tapi militansi kedua partai ini tak diragukan lagi apalagi yang diusung adalah pasagan calon yang mendekati kesempurnaan.”³¹

Argumen lain juga disampaikan oleh Khairul Amsal salah satu tim sukses dan simpatisan pasangan Zul-Rohmi yang mengelaborasi tentang politik pencitraan dengan membangun sentuhan emosional (*Emotional Bounding*) pasangan calonnya dengan mengatakan;

³⁰ Wawancara dengan Asrorul Hadi, tim sukses pasangan Zul-Rohmi di Praya pada tanggal 27 juni 2018.

³¹ Wawancara dengan Ahmad Ziadi, Tim Sukses pasangan Zul-Rohmi sekaligus Ketua DPC Demokrat Lombok Tengah di Praya tanggal 20 Juli 2018.

"Zul-Rohmi adalah idealitas pemimpin NTB. Karena saya meyakini keterwakilan perempuan di ranah politik masih cukup langka. Maka hadirnya Bu Rohmi sedikit tidak akan banyak meraup suara pemilih dari kalangan perempuan. Strategi pencitraan kami sangat gampang yaitu dengan menggarap simpul-simpul pergerakan perempuan, menyentuh emosi para pemilih perempuan. Kesederhanaan bu Rohmi juga menjadi modalitas penting bagi kami untuk memasarkan pribadi cawagub nomor urut 3 ini. Pasangan Zul-Rohmi juga bermodalkan *media darling* yang kuat karena popularitas Cagub Zul yang politisi nasional dan riwayat karir politik dan keterlibatan intensif bu Rohmi di masyarakat"³²

Pendapat pelengkap lain datang dari Asrorul Amri salah satu tim sukses pasangan Zul-Rohmi juga, Pak Asror menyampaikan bahwa;

"Basis massa dan konstituen NW Pancor jelas secara aklamasi mengusung pasangan calon nomor urut 3, bahkan dalam muktamar NW saja pasangan ini secara resmi didukung oleh Pengurus Besar NW Pancor. Jadi, upaya mencitrakan pasangan Zul-Rohmi dengan dilekatkan dengan suara NW Pancor menjadi keharusan. Hal ini diperkuat juga oleh kapasitas Cagub Zul yang merupakan bagian dari pengurus inti dari PB (Pengurus Besar) NW Pancor."³³

Beberapa hal yang menjadi catatan bahwa politik pencitraan yang dilakoni oleh pasangan calon nomor urut 3 (Zul-Rohmi) beserta tim yaitu berupaya dengan berbagai cara menjalankan aktivitas politik pencitraan mulai dari membangun imago afiliasi politik dengan organisasi keagamaan NW. Pencitraan lain adalah berkaitan dengan upaya *branding* pribadi Cawagub urut 3 sebagai representasi dan keterwakilan perempuan di ranah publik politik.

³² Wawancara dengan Muhammad Amrillah, tim sukses pasangan Ahyar-Mori pada tanggal 24 Juli 2018.

³³ Wawancara dengan Asrorul Amri, tim sukses pasangan Zul-Rohmi pada tanggal 25 Juli 2018.

4. Ali Bin Dahlan dan TGH Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti

Ali Bin Dahlan lahir pada 30 Desember 1948 di Lombok Timur. Ali BD mengawali pendidikan formal di Sekolah Rakyat (SR) Dasan Geres, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMPN Selong dilanjutkan di SMAN Selong dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Satyagama.

Mengawali karir sebagai guru di SMA Al-Ma'arif dan kepala sekolah di SMP, Ali BD juga pernah menjadi wartawan, PNS, berwiraswasta dan mendirikan yayasan sampai menjadi ketua forum Lembaga Swadaya Masyarakat NTB.

Ali BD pernah menjabat sebagai Bupati Lombok Timur Periode 2003-2008 dengan wakilnya Rachmat Suhardi. Kalah pada Pilkada 2008-2013 dan kembali mencalonkan diri dari jalur perseorangan dan memenangkan Pilkada Bupati Lombok Timur priode 2013-2018. Pada Kontestasi Pemilihan Gubernur NTB 2018, Ali BD menggandeng Gede Sakti Amir Murni sebagai calon wakil Gubernur dari jalur perseorangan.

Adapun Lalu Gede Sakti Amir Murni adalah politisi kelahiran Pancor Lombok Timur tanggal 01 April 1971. Pengabdian politiknya banyak dilakoni sebagai anggota legislatif di DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan DPRD Provinsi NTB serta beberapa kali mencalonkan diri sebagai wakil Bupati maupun calon Bupati Lombok Tengah.

Hingga di akhir pendaftaran calon, pasangan Ali-Sakti resmi menjadi peserta PILGUB NTB 2018 dan satu-satunya calon yang lahir dari jalur perseorangan dengan mendapatkan nomor urut 4.

Ali-Sakti meyakini visi misi perubahan untuk NTB lima tahun akan datang dengan slogan "maju bersama rakyat untuk membangun NTB yang beradab, berkarakter dan berbudaya". Visi misi pasangan dengan nomor urut 4 diturunkan dalam bentuk program kerja unggulan yaitu; (1) Menciptakan aparatur Negara dan birokrasi yang berkompeten untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, efektif, dan efisien, responsif, cepat dan melayani masyarakat dengan baik, (2) Pembangunan

yang berkelanjutan dengan perencanaan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan sehingga kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran (3) Membangun perekonomian berbasis potensi daerah yang dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat sebagai upaya untuk memajukan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan dan peternakan yang modern sehingga berdampak pada pendapatan masyarakat.

Visi misi calon nomor urut4 pasangan Ali-Sakti menjadi pedoman bagi para tim sukses dalam rangka mencitrakan calonnya untuk dikampanyekan kepada pemilih NTB. Pasangan calon Ali-Sakti tentu ideal dan unik bagi tim sukses. Keunikan dan Idealitas ini dicerna dan dideskripsi dengan baik oleh Basri Mulyani selaku ketua tim sukses pasangan Ali-Sakti yang menyatakan bahwa:

“Keunggulan paling utama pasangan Ali-Sakti adalah lahir dan hadirnya dari dukungan non partai tetapi dari jalur perseorangan yang secara langsung tentu merupakan suara murni dari rakyat bawah (*grassroot*). Sehingga langkah-langkah kemenangan pasangan dengan nomor urut 4 ini tentu dengan modalitas sosial yang memadai. 400 ribu KTP masyarakat NTB menjadi kekuatan awal bagi kami. Cagub Ali BD adalah seorang yang visioner dan Cawagub Gde Sakti merupakan representasi ulama dengan basis massa NW Anjani, juga Rektor UNW Mataram yang menggambarkan basis intelektualitas yang cukup mumpuni. Intinya, kami adalah satu-satunya pasangan calon yang merakyat karena benar-benar datang dari animo masyarakat NTB”³⁴

Pendapat ketua tim sukses pasangan Ali-Sakti merupakan gambaran awal tentang begitu kuatnya modalitas pasangan nomor urut 4 ini dalam kaitannya dengan infrastruktur politik dan modalitas sosial. Pasangan yang memiliki kredibilitas dan elektabilitas yang baik dengan

³⁴ Wawancara dengan Basri Mulyani, Ketua tim sukses pasangan Ali-Saktii di rumah pemenang Langko-Mataram pada tanggal 26 juni 2018.

visi misi yang nyata dan mencitrakan juga calon wakil gubernur yang agamais dan memiliki ketokohan Tuanguru juga.

Argumentasi yang realtif sama juga disampaikan tentang kelebihan pasangan Ali-Sakti lengkap dengan strategi membangun citra politik disampaikan oleh Lalu Tajir Syahroni dengan ungkapan sebagai berikut;

“Pasangan Ali-Sakti adalah pasangan yang kompak dan menyatu, karena pasangan ini merepresentasi kekuatan rakyat karena satu-satunya dari jalur perseorangan. Kami sangat konsisten karena tawaran partai juga banyak tapi karena untuk menjaga konsistensi dan membuktikan kepada masyarakat tentang sifat istiqomah inilah yang memperkuat semangat kami untuk mengambil hati rakyat NTB pada PILGUB NTB 2018. Pasangan Ali-Sakti tentu pilihan terbaik rakyat karena Cagub Ali BD adalah sebelum mencalonkan diri merupakan Bupati Lombok Timur yang bergaya nyentrik dan aktivis, ditopang lagi dengan Cawagub Gde Sakti yang santri dan juga keterwakilan organisasi keagamaan NW Anjani yang memiliki basis suara militan. Modal kedekatan dengan rakyat inilah yang mendorong kami untuk mencitrakan pasangan Ali-Sakti dengan memampang foto-foto kedekatannya dengan masyarakat kelas bawah seperti penjual dan pedagang kaki lima dan lain-lain.”³⁵

Junaidi (salah satu tim sukses) pasangan Ali-Sakti juga membahas tentang citra politik dan politik pencitraan pasangan calonnya dengan menyatakan bahwa;

"Usaha kami menempelkan calon nomor urut 4 (Ali-Sakti) dengan bingkai bersama rakyat adalah dengan cara-cara *nyeleneh* yang tujuannya untuk mempopulerkan kedekatan Cagub Ali BD dengan rakyat dan *grassroot*. Itu tergambar banyak dengan baliho-panflet yang menggunakan diksi-diksi *amaq ketujur*, *Amaq Asrur*³⁶ dan foto-foto Cagub Ali sedang bersama pedagang semangka dan lain-lain yang sedikit tidak akan melahirkan

³⁵ Wawancara dengan Lalu Tajir Syahroni, Tim Sukses pasangan Ali-Saki di Mataram tanggal 21 Juli 2018.

³⁶ Amaq adalah panggilan bagi Bapak pada masyarakat yang di-sterotype-kan sebagai panggilan warga masyarakat kelas bawah di masyarakat Sasak-Lombok.

ketertarikan visual bagi pemilih melihat kebersahajaan calon kami. "³⁷

Dari beberapa argumen dan pola politik pencitraan yang digambarkan oleh para calon dan tim sukses pasangan nomor urut 4 catatan bahwa politik pencitraan yang dibangun berupaya dengan berbagai cara menjalankan aktivitas politik pencitraan dengan lagi-lagi men-personifikasi Cagub sebagai seorang yang populis merakyat dan aktivis dan satu-satunya calon Gubernur yang bergaya *nyeleneh*. Cagub nomor urut 4 merupakan kontestan yang paling senior dari segi usia dibanding calon lain. Pencitraan dalam bentuk lain adalah berkaitan dengan melekatnya pribadi Cawagub sebagai representasi dan keterwakilan semua organisasi keagamaan NW Anjani. Oleh karena alasan satu-satunya pasangan calon dari perseorangan memberi keyakinan kepada mereka tentang kedekatannya dengan masyarakat.

³⁷ Wawancara dengan Junaidi, tim sukses pasangan Ali-Saktii pada tanggal 23 Juli 2018

C. Fenomena politik pencitraan Pada Kontestasi Pemilihan Gubernur NTB 2018

Politik pencitraan dalam beberapa dekade terakhir menjadi objek kajian baru dalam diskursus politik kritis. Dalam situasi perubahan sistem politik seiring dengan reformulasi pola kampanye dan sistem suara terbanyak terhadap agenda pemilihan umum di Indonesia. Elit politik mencoba memainkan situasi yang multilevel dengan beragam jenis *prototype* yang seringkali berdialog dan berdiaspora dengan realitas transformasi kepentingan politik-publik.

Biasanya bentuk pencitraan politik yang dilakukan para politisi dengan mencoba memainkan strategi prosesi pembentukan citra dalam memperoleh dukungan opini publik. Dalam studi politik, konstruksi pencitraan politik pada prinsipnya berlangsung melalui tahapan mulai dari pencitraan para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, peran serta media sosial sampai pada ranah publik-politik yaitu masyarakat NTB.

Ada pesan politik yang terbangun dengan mencoba menghegemoni masyarakat melalui program-program maupun kebijakan-kebijakan yang ditafsirkan mampu menerjemahkan kebutuhan rakyat yang terkadang dalam pelaksanaan menihilkan kepentingan umum (*masalah ammah*).

Transformasi pecitraan politik seringkali mengindikasikan kecenderungan terhadap upaya ketersediaan lahan politik perihal suksesi kepentingan partai politik, kelompok maupun individu. Fenomena ini secara nasional merujuk pada situasi dilematis terhadap keberadaan politik itu sendiri. Pada ranah argumentasi tentu memberikan kesadaran bahwa kekuatan dan kualitas representasi wilayah politik merupakan suatu keniscayaan akibat eksklusifitas politik rakyat dari institusionalisasi demokrasi yang serta merta hanya sebagai bentuk pemenuhan pretensi politik pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Patut diingat juga bahwa politik pencitraan dikonstruksi untuk menggambarkan seseorang, pejabat, partai, ormas atau calon Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki sisi positif dan negatif. Politik pencitraan positif digunakan untuk mengangkat elektabilitas diri calon melalui strategi pencitraan dan pemasaran yang elegan dan bertanggung jawab. Sehingga politik pencitraan merupakan upaya yang baik secara etis dengan memasarkan calon yang mempunyai reputasi baik agar berterima secara elektoral oleh pemilih termasuk pada Pilgub NTB 2018. Di lain sisi, ada juga model politik pencitraan negatif yang cenderung melebih-lebihkan calon pasangan, memaksakan pencalonan dengan menihilkan tanggung jawab publik yang diemban serta contoh lain yang berusaha menkonstruksi paradoksal yang berbeda dengan realitas calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Mungkin ketika berbicara mengenai budaya politik terasa tidak tepat dalam melihat fenomena politik pencitraan khususnya di NTB. Agak jauh dari kata budaya bila stigmatisasi negatif disandingkan dengan kata budaya politik. Karena budaya politik tidak bisa dilepas-sandingkan dengan etika politik. Etika politik mengandaikan aspek normatif moral dan etika, kaedah budaya (permainan yang *fair* dan adil) dan yang paling utama adalah kepedulian terhadap pembinaan nilai-nilai politik yang berkeadaban guna mewujudkan cita-cita politik yang bermartabat. Penekanan pada aspek normative mengadnal kan etika politik demokrasi prosedural yang ditandai dengan suksesi politik adalah dalam rangka praktik penyelenggaraan pemerintahan di NTB menjadi lebih baik.

Cita-cita etika politik adalah untuk meningkatkan eskalasi semakin diperluasnya lingkup kebebasan dan semakin terciptanya institusi-institusi yang lebih berkeadilan. Kebebasan dalam konteks ini adalah kebebasan sosial politik yang menyetarakan antara konstituen dengan yang dipilih dalam ruang bersama yang saling memberikan masalah kebaikan antara satu dengan yang lain. Karena senyatanya, kebebasan mempersyaratkan dimensi fisik, sosial dan

politik yang diperlukan untuk pelaksanaan konkrit kebebasan. Kebebasan sosio-politik ini mencakup kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul serta kebebasan pers yang menjadi pilar demokrasi pancasila yang dicita-citakan. Itu semua memungkinkan akan terlaksana bila dalam logika politik para politisi NTB terbangun etika politik yang berkeadaban dan penuh kemaslahatan. Dan jaminannya tentu mempersyaratkan pluralitas kehendak yang dibingkai oleh para politisi NTB guna menformula pilihan dan sikap politik yang sesuai dengan semangat konstituen sehingga menjadi populis bukan kondisi pemaksaan kehendak.

Sebut saja kesantunan politik apa yang harus diinisiasi oleh para bakal calon yang berkontestasi pada pilgub NTB 2018 nantinya. Sikap batin positif sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan cara berkomunikasi politik yang santun dan setara kepada para konstituen yang telah memilihnya untuk mendiskusikan fakta politik yang memungkinkan akan memberi jalan pada keharusan mencalonkan diri pada pilgub NTB 2018. Sikap politik dengan mendiskusikan dan meminta izin beserta mengkalkulasi kemungkinan harus intensif dilakukan bersama konstituen yang telah memilihnya dengan ketulusan. Pada faktanya, beberapa bakal calon kontestan pilgub NTB 2018 dengan sangat santai memburu kemungkinan menjadikan dirinya sebagai bakal calon gubernur padahal masa amanahnya baru berjalan kurang dari 2 tahun. Peneliti bisa pastikan tentu beberapa politisi NTB itu belum pernah melakukan komunikasi dengan konstituen di bawah. Dalam politik, komunikasi sangat memegang peran penting untuk tercapainya tujuan-tujuan politik yang mengandaikan keadilan, kemakmuran dan kemaslahatan sebuah pemerintahan termasuk ditingkat provinsi seperti NTB. Karena setiap bentuk komunikasi akan melahirkan dan menghasilkan makna yang tidak hanya pencitraan politik akan tetapi nilai amanat yang harus menjadi ruh dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pada konteks berpolitik di NTB dapat diperhatikan bahwa semenjak era reformasi yang membuka kran demokrasi dan kebebasan politik seluas-luasnya.

Tampak jelas dan miris dimana para politisi ini mempertontonkan kendornya etika politik dalam setiap jejak perjalanan suksesi demokrasi prosedural yang tergambar pada kontestasi menjelang pilgub NTB 2018 maupun demokrasi substantif. Sikap pragmatisme dalam politik pencitraan yang individuatif dan atau mementingkan kelompoknya saja tanpa menghiraukan kepentingan daerah yang menjadi prioritas utama. Kondisi ini dalam praktik keseharian menggambarkan politik berwajah kuasa elitis daripada kekuasaan dengan wajah populis dan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat. Politik menjadi identik dengan strategi bagaimana kekuasaan diraih dan dengan cara apapun walaupun bertentangan dengan kesadaran dan pandangan umum melalui politik pencitraan yang berlebihan.

Pada prinsipnya pilkada dimanapun termasuk pilkada Gubernur NTB 2018 merupakan momentum interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat yang terjadi pada saat pesta demokrasi dalam bentuk pemilihan. Pemilihan kepala daerah langsung adalah memberikan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat untuk menentukan kepala daerah (gubernur) yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah sehingga *output dan outcome* kebijakan pun nantinya berkesesuaian dengan ekspektasi dan keinginan masyarakat. Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan kepala daerah pastinya memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan, baik sebagai sarana legitimasi politik, fungsi perwakilan politik dan sebagai mekanisme pergantian atau sirkulasi elit penguasa tingkat daerah. Pilkada secara langsung terkait dengan perwujudan hak kedaulatan rakyat yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1 Hak kedaulatan rakyat yang secara langsung menggunakan hak pilihnya secara utuh termasuk dalam memilih Gubernur, jadi tidak ada lagi ruang untuk mengkondisikan pelaksanaan pilkada yang penuh dengan tipu-tipu politik dan membohongi rakyat
- 2 Wujud nyata atas pertanggungjawaban kepemimpinan seorang kepala daerah kepada rakyat yang memilih. Hal ini yang memperkuat argumentasi tentang keharusan penilaian dan kontrol masyarakat

terhadap kinerja kepala daerah dengan mempragakan sikap politik yang berkeadaban dan santun serta keberpihakan yang tegas kepada kepentingan dan kemasalahatan masyarakat

- 3 Menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya hubungan antara pemerintah daerah dan rakyat. Karena keserasian keseimbangan antara keduanya akan membawa pengaruh yang menentukan bagi tegaknya suatu pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Pemilihan kepala daerah secara langsung harus dimasukkan dalam kerangka besar untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis. Setidaknya ada tiga alasan pokok mengapa pemilihan kepala daerah secara langsung harus dikaitkan dengan pemerintahan lokal yang demokratis. *Pertama*, pemerintah lokal yang demokratis membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal (*political equality*). *Kedua*, pemerintah lokal yang demokratis mengedepankan pelayanan kepada kepentingan publik (*local accountability*). *Ketiga*, pemerintah lokal yang demokratis meningkatkan akselerasi pembangunan sosial ekonomi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat (*local responsiveness*).

Problem dasarnya adalah di setiap perhelatan pilkada termasuk di NTB, perilaku para pelaku politik maupun pihak-pihak yang berkait dalam pelaksanaan pilkada yang menengarai dan menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai penyimpangan. Agenda pilkada menjadi ajang untuk mengejar posisi kepala daerah sebagai sebuah profesi yang menguntungkan bukan lagi sebagai tanggung jawab, sehingga orientasinya lebih banyak mengarah kepada keinginan menghalalkan segala cara guna mendapatkan jabatan tersebut. Perilaku politik melupakan janji kampanye menyelesaikan masa jabatan dinafikan bila kontestasi yang lebih besar digelar seperti pada pilgub NTB 2018. Para bupati/walikota dengan semangat yang luar biasa mencari jalan untuk bisa ikut berkontestasi pada gelaran pilkada gubernur NTB di 2018.

Catatan di atas mensinyalir dengan baik bahwa secara keseluruhan para bakal calon Gubernur pada pilgub NTB 2018 tidak banyak yang menegaskan argumentasi pencalonannya dengan uji klinis terhadap visi dan misinya dalam mencalonkan diri. Program-program yang menysasar peningkatan kesejahteraan rakyat NTB kadang tak terdengar apalagi dengan *test-stone* (batu uji) TGB yang menyodorkan keberhasilan-keberhasilan fenomenal dalam pembangunan NTB. Maka, seyogyanya kemampuan-kemampuan manajerial dan *leadership* itu yang harus dielaborasi sebanyak-banyaknya. Bukan sebaliknya, hanya banyak mempertontonkan syahwat politik dan berkuasa dengan kadang-kadang menurunkan integritas pribadi para politisi NTB itu sendiri.

Tanpa kita sadari, nilai etis politik cenderung mengarah pada kompetisi dan kontestasi yang mengabaikan demokrasi substantif. Ini terbukti dengan mengguritanya *political shopping* (pasar politik) karena semua harga jabatan politik setara dengan sejumlah uang dan semua jabatan politik memiliki banderol (daftar harga) yang harus dibayar. Belum lagi, preferensi kepada pilihan politik yang kadang-kadang menyesakkan nurani dengan fakta-fakta para politisi dengan sangat santai meninggalkan kewajiban menjalankan amanat sampai periode berakhir tetapi sudah memburu posisi yang lebih tinggi dan strategis tanpa ada sedikitpun upaya untuk berkonsultasi dengan konstituen yang sekaligus tempat menyerahkan dan melaporkan pertanggungjawaban sebagai ekspresi kedaulatan rakyat. Fenomena politik yang menyeruak belakangan pada kontestasi setiap pilkada ini malah mengarah serta menohok pada arus balik yang condong mengotori demokrasi substantif. Apa yang terlihat adalah hadirnya nilai-nilai *psedu-democracy* (kepura-puraan demokrasi).

Sedikit tidak ada beberapa contoh kasus yang mencederai etika politik dan etika politik Islam di pada perhelatan pilkada dimana pun tidak hanya di NTB. Persoalan etika dan prilaku politik para politisi dan pemimpin baik dari tingkat pusat sampai daerah (provinsi, kabupaten dan kota) mempertontonkan politik pencitraan dalam rangka mengejar posisi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Misalkan saja dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) seperti pemilihan

Gubernur termasuk di Nusa Tenggara barat (NTB), dalam pilkada sebelumnya si A terpilih menjadi wakil rakyat, Bupati atau Walikota yang itu berarti si A harus mengemban amanat dan bertanggung jawab kepada konstituen selama 5 tahun kedepan. Namun, karena ada momentum pemilihan Gubernur 2018 serta merta hasrat kuasa itu membuncah untuk siap-siap mencalonkan diri menjadi calon Gubernur dengan tanpa rasa dosa penghianatan terhadap janji ketika kampanye di tingkat kabupaten dan kota dengan amanat menyalanggarakan pemerintahan sesuai dengan masa bakti dilantik.

Dalam level sederhana politik pencitraan dalam pentas pemilihan Gubernur NTB 2018 didalamnya ada *political marketing* karena para kandidat dipasarkan seperti menjual sebuah produk.

Untuk menganalisis politik pencitraan NTB menjelang pilgub 2018, di bawah ini akan diurai beberapa kecenderungan;

1) Antusiasme Syahwat Politik ke Level Lebih Tinggi

Kecenderungan pertama ini terjadi begitu saja tanpa adanya pertimbangan yang jelas apalagi dikomunikasikan lebih dahulu kepada konstituen pemilihnya. Modalitas partai bisa jadi menjadi pertimbangan paling utama yang menyebabkan calon A dan B sangat antusias untuk melaksanakan niat pribadinya untuk mencalonkan diri pada kontestasi pilgub NTB 2018. Perimbangan lain tentu datang dari konstalasi besar partai-partai untuk memperkuat dan mengembangkan sayap politik yang menggurita sampai di daerah termasuk NTB.

Argumentasi resmi dari partai mencalonkan A dan B adalah terbukti berhasil menjadi bupati/walikota dua periode, selama menjadi bupati/walikota calon A dan B memiliki *track record* yang baik dengan membawa kemajuan dan kesejahteraan rakyat, di samping itu calon A dan B disimpulkan memiliki elektabilitas yang tinggi berdasarkan hasil survei internal. Klaim berlebih juga didapatkan oleh calon A dan B sebagai pemimpin yang dicintai dan dikehendaki rakyat karena dekat dan selalu bersama rakyat. Terakhir kedua tokoh dikenal sebagai tokoh

agama dan pemimpin yang mempunyai basis keagamaan yang kuat serta di dukung oleh partai yang lain.

Pencitraan politik di atas dilakukan semata-mata karena adanya syahwat politik dalam mencitrakan satu pasangan calon dengan tanpa berusaha mengkonsultasikannya dengan para konstituen yang memilihnya atau masyarakat yang dipimpin pada saat dia mencalonkan diri.

2) Perempuan dan Kecenderungan Politik Dinasti

Sebut saja C salah satu bakal calon Gubernur NTB yang notabene tanpa harus ditutup-tutupi berkecenderungan politik dinasti. Munculnya calon C patut diperhitungkan secara politik karena beberapa sebab. Antara lain pertama, karena –sampai penelitian ini dilakukan– calon C menjadi satu-satunya nama yang muncul di kalangan perempuan terkait kontestasi Pilkada NTB 2018. Kedua, calon C merupakan kakak kandung petahana yang telah memberikan “cita rasa sedap” pada proses pembangunan sosial kemasyarakatan NTB dalam sepuluh tahun terakhir.

Secara praksis, fenomena di atas yaitu mayoritas pemimpin perempuan itu lahir dari rahim dinasti politik dalam artian selalu mewarisi sumber-sumber simbolik kepemimpinan anggota keluarganya. Pilihan kecenderungan politik dinasti berkah patut disematkan kepada calon C dengan fakta melekatnya sumber simbolik kepemimpinan baik dari kakek, orang tua maupun saudaranya. Di samping kepemilikan *track record* yang baik dalam dunia politik dan intelektualitas yang memadai juga dimiliki oleh calon C.

Analisis politik pencitraannya adalah kalau menyimpulkan pada simpul demokrasi dan politik yang berkeadaban dan setara, maka calon perempuan dengan dinasti politik tentu memiliki ruang yang sama dalam kontestasi pilkada Gubernur NTB 2018. Tapi problem

dramatisnya adalah keharusan calon C untuk menguji elektabilitas dan keberterimaan politik masyarakat NTB yang harus dilakukan secara *fair* tanpa melibatkan politik dinasti dan tekanan institusional organisasi yang memengaruhi masyarakat. Ini penting guna menghindari asumsi yang semata-mata telah terjadi fenomena politik dinasti.

3) Politisi Nasional Turun Gunung

Realitas politik Pilkada selalu menyuguhkan polarisasi yang kompleks dikarenakan legitimasi dan jawaban argumentatif yang melatarinya. Sebut saja beberapa bakal calon yang berniat pada pilkada Gubernur NTB 2018 dengan sangat semangat turun gunung dari pentas politik nasional untuk mengadu nasib pada Pilgub 2018 nantinya. Pertimbangan mengabdikan pada daerah paling sering muncul menjadi alasan klasik untuk melegitimasi pilihan politik. Beberapa bakal calon tersebut kalau disebutkan telah memiliki posisi dan jabatan politik yang mentereng di kancah perpolitikan nasional, akan tetapi daya tarik Pilkada selalu menjadi rangsangan kuat untuk dilakoni.

4) Personafikasi Personal Kandidat

Momentum Pilgub NTB 2018 memperlihatkan adanya fenomena pencitraan calon Gubernur dan Wakil Gubernur baik dengan foto-foto di baliho dalam citra tokoh agama (Tuan Guru: Sasak) lengkap dengan surban dan peci putih, tokoh adat dengan menyematkan simbol-simbol tradisi Sasak serta simbol-simbol warna yang melambangkan warna organisasi sosial dan keagamaan tertentu.

Penonjolan citra yang berbasis dan berintegritas agamais (Muslim), tidak jarang menjadi salah satu strategi komunikasi politik pencitraan. Kesalehan dalam bungkus ritus keagamaan dan semiotika melalui pakaian dan atribut menjadi petanda masif politik pencitraan pada masing-masing kandidat. Fakta ini menjadi wajar karena simbol agama masih dianggap determinan dan serius untuk dijalankan pada

pembangunan citra. Agama juga menjadi senjata yang ampuh dalam usaha menarik dan mengail dukungan dan simpati pemilih pada momen kandidasi pemilihan Gubernur di NTB.

Secara teoritis, tidak ada yang salah dalam pilihan membangun citra politik melalui simbol-simbol religiusitas. Karena dalam hal *candidate-oriented campaigns* bukan hal yang aneh bila dalam kampanye mendadak adanya kecenderungan penguatan simbol-simbol keagamaan para kandidat melalui ritus agama dan penampilan fisik yang seharusnya menjadi kesalehan personal.

5) Pseudo-Populis

Model politik pencitraan lain yaitu adanya fenomena mendadak populis yang ditampilkan oleh beberapa calon dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan cara menampilkan foto-foto kedekatan sang calon dengan masyarakat bawah seperti pedagang kecil, para tunawisma dan lain-lain yang terpampang di ruang-ruang publik dengan aksentuasi begitu dekatnya para calon dengan *grass-root*.

Fakta juga menggambarkan upaya politik pencitraan dengan penggunaan nama-nama populis seperti *amaq*³⁸ untuk menggambarkan *pseudo-populis* sang calon dengan berusaha merepresentasikan diri dengan golongan tertentu guna menarik simpati elektoral.

6) Penguatan Identitas Komunal dan Kewilayahan

Identitas komunal seperti afiliasi pada organisasi keagamaan, putra daerah yang berbasis kewilayahan dan asal suku juga menjadi mainan empuk para calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka mengail elektabilitas pada Pilgub NTB 2018.

³⁸ Diksi *amaq* dalam masyarakat Sasak berarti Bapak yang dalam tradisi stratifikasi sosial masyarakat Sasak termasuk sebutan untuk kelas sosial jajar karang yang berada di bawah stratifikasi bangsawan.

D. Analisis *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Politik Pencitraan pada PILGUB 2018

Citra adalah segala hal yang berkaitan dengan situasi kesaharian seseorang menyangkut pengetahuan, perasaan dan kecenderungannya terhadap sesuatu. Sehingga citra bisa berubah seiring dengan perjalanan waktu. Secara teoritis, citra akan terlihat dan terbentuk melalui proses penerimaan secara fisik indrawi, masuk ke saringan perhatian (*attention filter*) dan menghasilkan pesan yang dapat dilihat dan dimengerti (*perceived message*) yang berubah menjadi persepsi dan akhirnya membentuk citra.³⁹

Politik pencitraan baik positif maupun negatif sedikit tidak merupakan jalinan pikiran, perasaan dan kebaikan subyektif yang akan memberi kepuasan pada yang melakoni politik pencitraan tersebut yang paling tidak memiliki kegunaan yaitu: 1). Betapapun benar atau salah, lengkap atau tidak lengkap pengetahuan dan keadaban dalam politik memberi jalan pada calon atau pasangan calon untuk mencitrakan dirinya secara baik. 2) Kesukaan dan ketidaksukaan umum pada citra seseorang tentang politik menjadi dasar untuk menilai objek politik termasuk pada kontestasi pemilihan gubernur di NTB. 3) Citra diri calon dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur memberikan cara bagi terhubungnya dengan para pemilih. Argumen teoritis ini menggambarkan bahwa politik pencitraan memang dilakukan sebagai wujud komunikasi politik yang dilakukan secara persuasif untuk memperluas arsiran wilayah harapan antara kandidat dengan pemilih. Uniknya, figur-figur yang bersih dan baik dengan kandidat yang bermasalah (*notorious*) sama-sama

³⁹ Wyne De Lozier dalam Nimmo, *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 44.

secara substansial memiliki peluang untuk memasarkan diri dan bekerja keras membangun citra politik guna memengaruhi pemilih karena hukum dasar citra telah menjadi faktor paling menentukan sukses tidaknya sebuah perjalanan suksesi dan kampanye.

Citra dalam politik pada galibnya lebih dari sekedar strategi untuk menampilkan kandidat kepada para pemilih. Tetapi juga berkaitan dengan kesan yang dimiliki oleh pemilih baik yang diyakini sebagai hal yang benar atau tidak. Artinya, citra lebih dari sekedar pesan yang dibuat oleh kandidat maupun gambaran yang dibuat oleh pemilih, tetapi citra merupakan negosiasi, evaluasi dan konstruksi oleh kandidat dan pemilih dalam sebuah usaha bersama. Dengan kata lain, keyakinan pemilih tentang kandidat berdasarkan interaksi atau kesalingbergantungan (*mutual acceptance*) antara yang dilakukan oleh kandidat dan persepsi pemilih juga. Dengan demikian, citra adalah transaksi antara strategi seorang calon dalam menciptakan kesan persoal dengan kepercayaan yang sudah ada dalam benak para pemilih.

Citra yang baik dengan sendirinya akan meningkatkan popularitas dan elektabilitas kandidat, begitupun sebaliknya. Sehingga tidak salah kiranya bila calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ikut pada kontestasi pemilihan Gubernur di NTB rata-rata melakukan politik pencitraan. Karena semakin dapat menampilkan citra yang baik, maka peluang untuk meraup dukungan pemilih semakin besar.

Di lain sisi, politik pencitraan banyak menggunakan sumbangsih peran media massa dalam melakoni komunikasi politik pencitraan. Karena pada dasarnya, citra terbentuk berdasarkan informasi yang diterima oleh publik-politik baik langsung dan tentu juga melalui media massa. Citra pada publik terwujud sebagai konsekuensi kognitif dari komunikasi. Peran media pada aktivitas politik tidak hanya didasarkan pada asumsi besarnya suatu peristiwa politik, namun juga nilai politik pada peristiwa dan momentum itu. Media juga bukan sekedar pelengkap komunikasi interpersonal, akan tetapi mendukung pertumbuhan politik kandidat dalam rangka penguatan modalitas politik yang

memberikan ruang bagi calon untuk memperkuat persepsi terhadap diri dan ruang popularitas baginya.

Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa etika politik merupakan dimensi moral filosofis dari ilmu politik praksis termasuk fenomena politik pilkada Gubernur NTB 2018 yang secara inheren harus dilatari oleh kemampuan menyadari signifikansi etika politik dalam ranah politik pencitraan yang resiprokal antara bakal calon dan modalitas konstituen pada suksesi Pilkada. Tanpa mendiskusikan dan melibatkannya akan membuat ilmu politik teoritis maupun praksis akan timpang. Sebut saja ketimpangan itu adalah pemiskinan politik.

Pemiskinan politik yang terungkap bila tidak mendamaikan dan mempertemukan antara ilmu politik praksis dengan etika politik, maka paling minimal ada 3 bentuk pemiskinan yang akan didapatkan yaitu; *pertama*, peniadaan perdebatan ideologi, diskusi panjang tentang nilai-nilai dan perdebatan tentang prioritas. Dengan demikian, pendekatan pragmatisme politik condong anti pluralitas karena wacana, wicara dan persuasi merupakan media komunikasi dengan yang lain tentu tidak mendapat tempat. Seperti pada Pilkada gubernur NTB 2018. Keharusan etis untuk mendalami dan menyelami keinginan masyarakat NTB atau konstituen secara spesifik dalam rangka menghindari keburukan dari pragmatisme politik pencitraan yang akibat negatifnya terkadang sampai menampilkan raut muka politik suksesi menjadi sangat tidak berkeadaban dikarenakan oleh tampilan politik pencitraan menjadi kepentingan yang tidak sedikit pun melibatkan konstituen dan masyarakat yang memiliki kedaulatan yang sebenarnya.

Kedua, pemiskinan politik tanpa etika politik merubah ruang publik menjadi tereduksi sebagai pasar (*political market*). Karena ketika tekanan adalah hasil maka ekonomi dan ekonomi politik menjadi perhatian utama. Sampai di sini saja, politik pilkada bila berfenomena pemiskinan politik dengan tampilan pasar politik akan menggadaikan secara otomatis ruang suci politik yang mencita-citakan pengelolaan kemaslahatan rakyat dengan jalur politik

yang mensucikan juga. Penyelenggaraan pemerintahan daerah direduksi menjadi manajemen kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau individu-individu. Dangangan politik akan menjadi politik yang benar-benar transaksional dan tentu mengeliminasi niatan politik yang mementingkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga NTB. Politik menjadi arena untuk mempertaruhkan kepentingan kelompok dan pribadi serta untuk mendapatkan pengakuan atas eksistensi. Di titik ini, sekali lagi agak susah membayangkan ekspektasi Hannah Arendt tentang politik sebagai seni mengabadikan diri dengan menjamin kebebasan setiap individu dan mengupayakan kesejahteraan bersama.

Ketiga, pemiskinan politik yang terjadi dalam lingkup etika politik adalah penolakan terhadap pluralitas dan praktek diskriminasi yang tentunya bertentangan dengan arah yang dibidik termasuk melecehkan kebebasan atau *hurriyah* dalam terminologi etika politik Islam. Pada persiapan kontestasi pilkada Gubernur NTB 2018. Secara tidak sadar praktik-praktik yang dilakoni para politisi NTB menjelang perhelatan suksesi itu menampakkan rasa politik pilkada yang sangat elitis karena seolah-olah yang berkepentingan adalah hanya individuasi politik dan eksistensi partai pengusung yang elitis. Keikutsertaan konstituen dan masyarakat NTB yang pada hakekatnya adalah pemilik sah kedaulatan dipagari hanya menjadi penonton yang baik dalam menyaksikan pentas politik praktis yang hanya berkepentingan untuk kuasa dan syahwat politik individu dan kelompok elitis partai dengan memprioritaskan pada usaha-usaha politik pencitraan.

Padahal kalau dikaji lebih mendalam, etika politik tidak hanya berkuat pada masalah perilaku politisi dan partai politik yang menjadi pilar dan infrastruktur demokrasi. Ia berhubungan dan berjaln kelindan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, budaya dan ekonomi.

Etika politik memiliki tiga dimensi yaitu tujuan, sarana dan aksi politik itu sendiri. Pada dimensi tujuan bila diurai dan dikontekstualisasi dengan

fenomena pilkada, maka tujuan suksesi adalah upaya sadar laku politik dalam upaya peremajaan dan pergantian kepemimpinan yang tujuannya tidak lain adalah peningkatan akseleratif pada tujuan-tujuan politik pilkada dalam rangka memacu dengan lebih cepat upaya penyejahteraan masyarakat dengan monitoring kuat dari etika politik yang santun, beradab dan berkeadilan. Sedangkan pada dimensi sarana, Opsi perhelatan pilkada langsung merupakan instrumen terbaik dalam rangka mendapatkan kualitas kontestasi politik yang terbuka dan memberi partisipasi penuh kepada warga masyarakat. Pada dimensi aksi politik berkaitan erat dengan prilaku politisi yang harus menjadikan etika politik yang santun, berkeadaban dan berkeadilan menjadi *guiding* di setiap prilaku politik yang selalu memenangkan hati konstituen dan rakyat sebagai wujud memberikan hak kedaulatan pada rakyat. Prilaku politisi juga hanya salah satu dari dimensi etika politik, karena ada kehendak baik (*political will and good will*) berperan sebagai media mempertajam makna tanggung jawab, sedangkan institusi (hukum, aturan, kebiasaan, lembaga sosial) mengambil peran untuk memobilisasi tanggung jawab.

Etika politik mengandung aspek individual dan sosial. Di satu pihak etika politik sekaligus etika individual yang mendiskusikan tentang kualitas moral pelaku dan etika sosial karena merefleksi masalah hukum, tatanan sosial dan institusi yang adil. Di lain pihak, etika politik sekaligus etika institusional dan etika keutamaan. Institusi dan keutamaan merupakan dua dimensi etika yang saling mendukung. Keutamaan merupakan faktor stabilisasi tindakan yang berasal dari dalam diri pelaku. Etika politik menjalin kait dengan tujuan politik, menyangkut masalah pilihan sarana dan berhadapan dengan aksi politik dan aksi politik langsung terhubung dengan laku politik.

Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan prikehidupan yang damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Keprihatinan utama ialah upaya penerapan kebijakan umum (*public policy*) dalam mengorganisir publik. Dalam Negara demokratis pemerintah memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan Negara dan bertanggung jawab

atas komitmen tersebut menuju kesejahteraan masyarakat dan hidup damai. Menghadapi masalah-masalah Negara, kebijakan umum pemerintah harus terumus jelas dalam hal prioritas, program, metode dan pendasaran filosofis lalu menjadi transparan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Atas dasar kebijakan umum ini, wakil rakyat dan pejabat politik serta kelompok masyarakat bisa membuat evaluasi pelaksanaan kinerja pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban. Kejelasan tujuan yang terangkum dalam kebijakan politik dan kebijakan publik akan menunjukkan ketajaman visi seorang pemimpin dan kepedulian suatu partai politik terhadap aspirasi masyarakat yang dimensi moralnya terpatri dalam kemampuan menentukan arah yang eksplisit kebijakan umum dan akuntabilitasnya.

Dimensi etika politik kedua adalah sarana yang memungkinkan pencapaian tujuan (*polity*). Dimensi ini meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan Negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Dimensi sarana mengandung dua pola normatif yaitu tatanan politik (hukum dan institusi) yang berkeharusan mengikuti prinsip solidaritas dan subsidiaritas, penerimaan pluralitas dimana struktur sosial ditata secara politik menurut prinsip keadilan. Prinsip kedua adalah penataan kekuatan-kekuatan politik yang ditata sesuai dengan prinsip resiprokal.

Dimensi ketiga etika politik adalah aksi politik (*politics*). Dalam dimensi etika ketiga ini pelaku memegang peran sebagai yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri dari rasionalitas tindakan dan keutamaan kualitas moral pelaku. Tindakan politik terkatagori rasional apabila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham masalah. Makna etis akan semakin dalam apabila tindakan politisi didasari oleh bela rasa dan keberpihakan kepada yang lemah.

Pada ujung bab ini, fenomena laku dramatis politisi NTB menjelang Pilkada Gubernur NTB 2018 diuji analisis dengan etika politik Islam. Etika politik Islam mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan etika lain. Etika politik Islam sekurang-kurangnya mempunyai lima ciri utama

yang dicobakan untuk operasinalisasinya dalam menilik fenomena laku dramatis politisi NTB:

Pertama, dimensi Rabbani (berketuhanan) dalam tujuan, sarana dan aksi politik. Pada momentum menjelang Pilgub NTB 2018, politik pencitraan para pasangan calon Gubernur dalam Pilgub NTB belum mampu menghadirkan dimensi robbani dalam penentuan pilihan politik dikarenakan semata-mata yang tergambar adalah politik dalam makna kepentingan. Itu belum sampai pada tujuan suci politik yang berpihak pada rakyat, belum dengan infrastruktur politik yang berketuhanan karena sangat elitis dan belum juga memilih aksi politik yang bernilai ibadah dalam rangka *sidqah* (amal) pengabdian yang memberi ruang manfaat dan maslahat sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia lain dan umat. Karena ciri rabbani (berketuhan) menegaskan bahwa etika politik Islam membimbing manusia ke arah yang benar atau jalan yang lurus.

Kedua, laku politik manusiawi. Fakta politik pencitraan para kontestan pilgub NTB 2018 yang lebih mementingkan *euphoria* pesta demokrasi prosedural dan bukan demokrasi substantif tersaji pada jelang pilkada Gubernur NTB 2018. Bagaimana tidak, politisi NTB dengan sangat santai melupakan janji politik yang bila memenangkan pertarungan pada pilkada tertentu untuk menyelesaikan masa jabatan sampai 5 tahun, tapi karena tergiur sahwat politik melupakan janji itu. Malah di beberapa tahun berjalan kepemimpinannya banyak menghabiskan waktu untuk bermanuver politik dan mencari jalan agar diusung menjadi bakal calon pada pilkada Gubernur NTB 2018. Fenomena ini menggambarkan begitu kurang memenuhi syarat etisnya politik praktis yang dilakoni oleh beberapa politisi. Wajar kiranya stigmatisasi minor “pemimpin tidak amanat”, “pemimpin kutu loncat” sering terdengar dan keluar dari mulut konstituen dan masyarakat. Karena ciri manusiawi berarti etika politik Islam memperhatikan dan memenuhi fitrah manusia serta menuntunnya agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Ketiga, etika politik Islam berdimesi universal. Dalam kontestasi menjelang Pilkada Gubernur NTB 2018 terlihat jelas keberpihakan politisi tidak banyak menyentuh dimensi terdalam relasi antara calon pemimpin dengan konstituen yang berdaulat. Para calon Gubernur dan calon Waki Gubernur lebih banyak mengorientasi visi politiknya hanya pada tujuan mendapatkan kekuasaan tanpa menyadari bahwa kebahagiaan hakiki politisi adalah kemampuan menebar *maslahat* dan berbagi atas nama cinta sesama. Karena ciri dimensi etika politik Islam universal ialah etika politik Islam membawa misi kasih sayang kepada ummat manusia di seluruh dunia, menegakkan kedamaian, menciptakan keamanan dan ketenangan baik secara individual maupun komunal.

Keempat, karakteristik etika politik Islam yang berkeseimbangan. Ciri keseimbangan artinya mengajarkan bahwa manusia memprioritaskan kepentingan ukhrawi tanpa melupakan kepentingan duniawi begitu juga memenuhi keperluan rohani tanpa mengabaikan keperluan jasmani. Niat tulus politik harus mencul dari keseluruhan politisi NTB yang ingin bertarung pada Pilgub NTB 2018. Karena segala tujuan, sarana dan aksi politik seyogyanya berorientasi pada bagaimana membangun keseimbangan antara kepentingan politis dengan nilai etis dari politis yang melahirkan kepuasan dan kebahagiaan yang pada ujungnya menjadi seni mengabadikan diri untuk selalu diingat dan didoakan bila waktu berakhir.

Kelima, karakteristik realistik dalam etika politik Islam. Ciri realistik dalam *patson* etika politik Islam adalah memperhatikan kenyataan hidup manusia. Pilkada Gubernur NTB 2018 yang akan digelar memerlukan kontestan yaitu para politisi NTB yang berpihak pada realitas sosial, ekonomi, budaya dan seluruh sendi kehidupan masyarakat dan konstituen. Bagaimana tidak, bila kesadaran melek kenyataan hidup tidak dimiliki oleh masing-masing bakal calon Gubernur NTB maka yang terjadi adalah kepura-puraan politik dan demokrasi yang bisa jadi sebatas aksi politik teoritis dan bersemayam di menara gading tanpa ada kemampuan para politisi untuk menurunkannya

menjadi fenomena politik yang memang membutuhkan aksi-aksi nyata dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, memakmurkan rakyat NTB dan selalu ada di hati rakyat yang berdaulat secara politik.

BAB V

A. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi, analisis dan penelaah secara kritis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa;

- a. Politik pencitraan yang dimainkan oleh Politisi NTB menjelang Pilkada memiliki beberapa kecenderungan yaitu; *pertama*, Antusiasme Syahwat Politik dimana A dan B mencalonkan diri menjadi Gubernur NTB 2018 padahal masa baktinya baru berjalan kurang dari 2 Tahun. *Kedua*, Fenomena perempuan dan kecenderungan politik dinasti. *Ketiga*, kecenderungan politisi nasional turun gunung. *Keempat*, Personafikasi Personal Kandidat seperti penonjolan citra yang berbasis dan berintegritas agamais (Muslim), tidak jarang menjadi salah satu strategi komunikasi politik pencitraan. Kesalehan dalam bungkus ritus keagamaan dan semiotika melalui pakaian dan atribut menjadi petanda masif politik pencitraan pada masing-masing kandidat. *Kelima*, Psedo-Populis yaitu adanya fenomena mendadak populis yang ditampilkan oleh beberapa calon dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan cara menampilkan foto-foto kedekatan sang calon dengan masyarakat bawah seperti pedagang kecil, para tunawisma dan lain-lain. *Terakhir* adalah Penguatan Identitas Komunal dan Kewilayahan seperti afiliasi pada organisasi keagamaan, putra daerah yang berbasis kewilayahan dan asal suku juga menjadi mainan empuk para calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka mengail elektabilitas pada Pilgub NTB 2018.
- b. Bahwa etika politik memiliki tiga dimensi yaitu tujuan, sarana dan aksi politik itu sendiri. Pada dimensi tujuan bila diurai dan dikontekstualisasi dengan fenomena pilkada, maka tujuan suksesti

adalah upaya sadar laku politik dalam upaya peremajaan dan pergantian kepemimpinan yang tujuannya tidak lain adalah peningkatan akseleratif pada tujuan-tujuan politik pilkada dalam rangka memacu dengan lebih cepat upaya penyejahteraan masyarakat dengan monitoring kuat dari etika politik yang santun, beradab dan berkeadilan. Sedangkan pada dimensi sarana, opsi perhelatan pilkada langsung merupakan instrumen terbaik dalam rangka mendapatkan kualitas kontestasi politik yang terbuka dan memberi partisipasi penuh kepada warga masyarakat. Pada dimensi aksi politik berkaitan erat dengan prilaku politisi yang harus menjadikan etika politik yang santun, berkeadaban dan berkeadilan menjadi *guiding* di setiap prilaku politik yang selalu memenangkan hati konstituen dan rakyat sebagai wujud memberikan hak kedaulatan pada rakyat.

- c. Pada perspektif etika politik Islam, maka politik pencitraan para calon dan pasangan calon pada Pilgub NTB 2018 tidak bisa dikehendaki terjadi karena; *Pertama*, keharusan Pilkada berdimensi *Rabbani* (berketuhanan) dalam tujuan, sarana dan aksi politik. *Kedua*, kewajiban laku politik para politisi yang harus manusiawi. *Ketiga*, Politisi yang beretika politik Islam harus berdimensi universal. *Keempat*, karakteristik etika politik Islam yang berkeeseimbangan. *Kelima*, karakteristik realistis dalam etika politik Islam yang harus mendasari visi dan misi para kandidat.

B. Implikasi Teoritis

1). Arah Baru Wacana Etika Politik

Etika politik mengandung aspek individual dan sosial. Di satu pihak etika politik sekaligus adalah etika individual karena mendiskusikan tentang kualitas moral pelaku dan etika sosial karena merefleksi masalah hukum, tatanan sosial dan institusi yang adil. Di lain pihak, etika politik sekaligus etika institusional dan etika keutamaan. Institusi dan keutamaan merupakan dua dimensi etika yang saling mendukung. Keutamaan merupakan faktor stabilisasi tindakan yang berasal dari dalam diri pelaku. Etika politik menjalin kait dengan tujuan politik, menyangkut masalah pilihan sarana dan berhadapan dengan aksi politik dan aksi politik langsung terhubung dengan laku politik.

Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan prikehidupan yang damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Keprihatinan utama ialah upaya penerapan kebijakan umum (*public policy*) dalam mengorganisir publik. Dalam Negara demokratis pemerintah memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan Negara dan bertanggung jawab atas komitmen tersebut menuju kesejahteraan masyarakat dan hidup damai. Menghadapi masalah-masalah Negara, kebijakan umum pemerintah harus terumus jelas dalam hal prioritas, program, metode dan pendasaran filosofis lalu menjadi transparan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Atas dasar kebijakan umum ini, wakil rakyat dan pejabat politik serta kelompok masyarakat bisa membuat evaluasi pelaksanaan kinerja pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban. Kejelasan tujuan yang terangkum dalam kebijakan politik dan kebijakan publik akan

menunjukkan ketajaman visi seorang pemimpin dan kepedulian suatu partai politik terhadap aspirasi masyarakat yang dimensi moralnya terpatri dalam kemampuan menentukan arah yang eksplisit kebijakan umum dan akuntabilitasnya.

Dimensi etika politik kedua adalah sarana yang memungkinkan pencapaian tujuan (*polity*). Dimensi ini meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan Negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Dimensi sarana mengandung dua pola normatif yaitu tatanan politik (hukum dan institusi) yang berkeharusan mengikuti prinsip solidaritas dan subsidiaritas, penerimaan pluralitas dimana struktur sosial ditata secara politik menurut prinsip keadilan. Prinsip kedua adalah penataan kekuatan-kekuatan politik yang ditata sesuai dengan prinsip resiprokal.

Dimensi ketiga etika politik adalah aksi politik (*politics*). Dalam dimensi etika ketiga ini pelaku memegang peran sebagai yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri dari rasionalitas tindakan dan keutamaan kualitas moral pelaku. Tindakan politik terkatagori rasional apabila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham masalah. Makna etis akan semakin dalam apabila tindakan politisi didasari oleh bela rasa dan keberpihakan kepada yang lemah.

2). Ruang Etika Politik Islam pada Konstruksi Teori Etika Politik

Etika Politik Islam mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan etika lain karena lahir dari curahan etika politik yang ada dalam kitab suci (Al-Qur'an). Etika Qur'ani sekurang-kurangnya mempunyai lima ciri utama: *pertama*, Rabbani (berketuhanan); *kedua*, *manusiawi*; *ketiga*, universal; *keempat*, berkeseimbangan; dan *kelima*, realistis. Ciri Rabbani menegaskan

bahwa etika politik Qur'ani membimbing manusia ke arah yang benar atau jalan yang lurus. Ciri manusiawi berarti etika politik Qur'ani yang memperhatikan dan memenuhi fitrah manusia serta menuntunnya agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ciri universal ialah etika politik Qur'ani membawa misi kasih sayang kepada ummat manusia di seluruh dunia, menegakkan kedamaian, menciptakan keamanan dan ketenangan baik secara individual maupun komunal. Ciri keseimbangan artinya mengajarkan bahwa manusia memprioritaskan kepentingan ukhrawi tanpa melupakan kepentingan duniawi, memenuhi keperluan rohani tanpa mengabaikan keperluan jasmani. Sedangkan ciri realistik adalah etika politik Qur'ani memperhatikan kenyataan hidup manusia.

3). Idealitas Politik Pencitraan

Politik pencitraan baik positif maupun negatif sedikit tidak merupakan jalinan pikiran, perasaan dan kebaikan subyektif yang akan memberi kepuasan pada yang melakoni politik pencitraan tersebut yang paling tidak memiliki kegunaan yaitu: 1). Betapapun benar atau salah, lengkap atau tidak lengkap pengetahuan dan keadaban dalam politik memberi jalan pada calon atau pasangan calon untuk mencitrakan dirinya secara baik. 2) Kesukaan dan ketidaksukaan umum pada citra seseorang tentang politik menjadi dasar untuk menilai objek politik. 3) Citra diri kandidat memberikan cara bagi terhubungnya dengan para pemilih. Argumen teoritis ini menggambarkan bahwa politik pencitraan memang dilakukan sebagai wujud komunikasi politik yang dilakukan secara persuasif untuk memperluas arsiran wilayah harapan antara kandidat dengan pemilih. Uniknyanya, figur-figur yang bersih dan baik dengan kandidat

yang bermasalah (*notorious*) sama-sama secara substansial memiliki peluang untuk memasarkan diri dan bekerja keras membangun citra politik guna memengaruhi pemilih karena hukum dasar citra telah menjadi faktor paling menentukan sukses tidaknya sebuah perjalanan suksesi dan kampanye.

Sebagian besar proses komunikasi politik merupakan *mediated politics* atau bahkan *media-driven politics*. Proses produksi dan mereproduksi berbagai sumber daya politik seperti menggalang dan menghimpun dukungan politik dalam kontestasi pemilihan termasuk kontestasi pemilihan Gubernur NTB. Politik pencitraan dalam bentuk rekayasa citra dapat dijumpai atau bahkan dikemukakan oleh industri media. Sehingga asumsi teoritis bisa muncul dan menjadi alat ukur bahwa keberhasilan politisi akan banyak ditentukan oleh kemampuannya membangun jaringan atau akses terhadap media untuk mengelola opini, persepsi, merebut simpati dan sebagainya. Secara teoritis juga bahwa hubungan politisi dan media massa bisa berjalan harmoni, karena media massa bisa memediasi kegiatan politik dari para politisi kepada masyarakat. Dan sebaliknya, media massa dapat mendesiminasikan opini, reaksi, tuntutan masyarakat kepada para politisi. Media massa menjadi ruang lalulintas bagi segala macam ide-ide yang menyangkut kepentingan orang banyak.

C. Rekomendasi

Penelitian ini hanya sekedar langkah awal dari kerja intelektual panjang dalam rangka mengelaborasi fenomena politik pencitraan politisi NTB pada Pilkada Gubernur NTB 2018 dengan perspektif etika politik Islam. Titik tekannya adalah pada kemampuan analisis etika politik Islam dalam ranah politik praktis dimanapun. Untuk itu, peneliti berharap penelitian baru, lanjutan

atau kritik terhadap penelitian ini akan menambah khazanah keilmuan Islam khususnya dalam ranah etika politik Islam sebagai salah satu subyek pemikiran politik Islam.

Daftar Pustaka

- Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Shulthaniyyah wal Wilayatu al-Diniyyah*, Mesir : Musthafa al-Asabil Halabi, 1973.
- Ahmad Fathi Bahatsi, *Al-Siyasah al-Jinayah fi al-Syari'at al-Islamiyah*, Dar al-Arubah, Tampa Tahun.
- Affan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ahmad Gaus AF, *Api Islam Nurcholish Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.
- Ahmad Nursal, *Political Marketing, Strategi Memenangkan Pemilu: Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*, Jakarta: Gramedia, 2004
- Anas urbaningrum, *Islam-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid*, Jakarta: Penerbit Republika, 2004.
- Andy Sulistiyanto, *Mujahid Dakwah yang tak Kenal Lelah*, dalam Edisi Khusus 100 Tahun Muhammad Natsir, Majalah Islam Sabili.
- Anwar Arifin, *Opini Publik*, Jakarta: Pustaka Indonesia, 2008
- Bob Franklin, *Packaging Politics*, First Publisher, London: Great Britain, 1994
- Brian McNair, *An Introduction of Political Communication*, London: Routledge, 1995
- Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Deliar Noer, *Islam dan Politik*, Jakarta: Yayasan Risalah, 2003.

Dennis Kavanagh, *Ellection Campaigning: The New Marketing Of Politics*, UK: Blackwell, 1997

Denny JA, *Melewati Perubahan: Sebuah Catatan Atas Transisi Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2006

Firmanza, *Marketing Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007

Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS: Suara Dan Syari'ah*, Jakarta: KPG, 2012.

Hannah Arendt, *The Human Condition*, Chicago: The Chicago UP, 1958.

Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014.

Ichsanul Amal, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.

Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi (Edisi Revisi)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

_____, *Partisipasi Partai Politik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Gramedia, 1982.

Muhammad Hawari, *As-Siyasah al-Hizbiyyah li al-harakah al-Islamiyyah: Syarh 'ala Kitab at-Takattul al-Hizbi*, Palestina: T.p, 2003.

Muhammad Zakaria al-Naddaf, *Akhlaqus Siyasi Li al-Daulah al-Islamiyyah Fi al Qur'an wa al-Sunnah*, Damaskus: Dar al-Qolam, 2006

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia Press., 1991.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo, 1992.

Robert E. Denton Jr. (Ed.), *Political Communication Ethics: An Oxymoron?*, Praeger Publisher, 2000

Rochajat Harun dan Sumarno, *Komunikasi Politik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Mandarmaju, 2006

Stanley J. Baran & Denni K. Davis, *Mass Communication Theory, Foundation, Ferment, and Future*, Wadsworth, 2000.

Sigmund Neuman, "Modern Political Parties", *Comparative Politics: A Reader*, Harry E. Eckstein (Ed.), .London : The Free Press of Glencoe, 1963.

Steven H. Chafee, *Political Communication*, Vol.VII, Sage Publication, 1975.

Yasraf Amir Piliang, *Hantu-hantu Politik dan Matinya Sosial*, Solo: Tiga Serangkai, 2003

Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012

JURNAL/MAKALAH

David Michel Ryfe, *History and Political Communication; An Introduction*, *Political Communication Journal*, 2001

M.Alwi Dahlan, *Perkembangan Komunikasi Politik Sebagai Bidang Kajian*, *Jurnal Ilmu Politik*, Universitas Indonesia, 1989

Effendi Gazali, *Hand Book Matakuliah Persuasi dan Manajemen Pencitraan*, MKompol, Universitas Indonesia, 2007

Steven Chaffee, *Studying the New Communication of Politics*, *Political Communication Journal*, 2001

TESIS/DISERTASI

Budi Utami, *Politik Pencitraan Calon Presiden, Studi Pemanfaatan Media Massa untuk Membentuk Citra Politik Megawati Soekarno Putrid an Wiranto*, Tesis Ilmu Komunikasi, Jakarta: FISIP UI, 2008

Effendi Gazali, *Communication of Politics amd Politics of Communication in Indonesia: A Study of Media Performance, Responsibility and Accountability*, Doctoral Thesis, Nijmegen: Radbound University Nijmegen, 2004

ARTIKEL/OPINI/BERITA SURAT KABAR

Algooth Putranto, *Ramadhan dan Citra Politik dalam Pertarungan Pilkada Serentak 2018*, Kompas.com, 18 Mei 2018

Galang Asmara, *Akibat Money Politic dan Kampanye Hitam dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Harian Nusa, Tanggal 22 Januari 2018

Yasraf Amir Piliang, *Banalitas Citra Politik*, Artikel di Harian Kompas, Tanggal 25 Juni 2004